

**PERANAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM
PENANGANAN KASUS PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Hukum (S.H) Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan
Pada Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar

Oleh : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULFI ALIS
NIM. 10300113200

**HUKUM PIDANA DAN KETATANEGARAAN
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2017**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulis skripsi Saudari Sulfi Alis, Nim: 10300113200 Mahasiswa Jurusan Hukum Pidana dan Kctatanegaraan pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul "Peranan Lembaga Bantuan Hukum dalam Penanganan Kasus Pelanggaran HAM Ditinjau dari Hukum Islam" memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke ujian *munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya.

Samata-Gowa, 29 november 2017

Pembimbing I

Prof. Dr. Achmad Abubakar, M.Ag
NIP. NIP. 19700701 199403 1 001

Pembimbing II

Abd. Rahman Kanang, M.Pd, Ph.D
NIP. 1973 1231 200501 1 034

Penguji I

Prof. Dr. H. Ahmad M. Sewang, M.A
NIP. 19520811 198203 1 001

Penguji II

Rahmiati, S.Pd., M.Pd
NIP. 19771005 200901 2 005

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sulfi Alis
NIM : 10300113200
Tempat/Tgl. Lahir : Kanang/25 Mei 1995
Jurusan : Hukum Pidana dan Ketatanegaraan
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Alamat : Jl. Mustafa Dg. Bunga
Judul : Peranan Lembaga Bantuan Hukum dalam Penanganan Kasus
Pelanggaran HAM Ditinjau dari Hukum Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata, Gowa, 29 Juli 2017

Penyusun,

SULFI ALIS

NIM: 10300113200

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "Peranan Lembaga Bantuan Hukum dalam Penanganan Kasus Pelanggaran HAM Ditinjau dari Hukum Islam". yang disusun oleh saudara Sulfi Alis, NIM 10300113200, mahasiswa Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2017 M, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1439 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan (dengan beberapa perbaikan).

Samata-Gowa, 6 Desember 2017 M.
17 Rabiul Awal 1439 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag	(.....)
Sekretaris	: Dr. H. M. Saleh Ridwan, M.Ag	(.....)
Munaqis I	: Prof. Dr. H. Ahmad M Sewang, M.A	(.....)
Munaqis II	: Rahmiati, S.Pd, M.Pd	(.....)
Pembimbing I	: Prof. Dr. Achmad Abubakar, M.Ag	(.....)
Pembimbing II	: Abdul Rahman Kanang, M.Pd, Ph.D	(.....)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALA UDDIN
M A K

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar,



Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M. Ag
NIP. 19621016 19903 1 003

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Sebuah perjalanan hidup selalu memiliki awal dan akhir. Ibarat dunia ini yang memiliki permulaan dan titik akhir. Perjalanan hidup selama 4 (tahun) begitu terasa dalam sanubari. Setelah melewati perjalanan panjang dan melelahkan, menyita waktu, tenaga, dan pikiran, sehingga penulis dapat merampungkan skripsi ini. Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Maka sepantasnyalah persembahkan puji syukur hanya di peruntukan kepada Sang Maha Sutradara, Allah swt. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul : “Peranan Lembaga Bantuan Hukum dalam Penanganan Kasus Pelanggaran HAM Ditinjau dari Hukum Islam”, Kemudian senantiasa mengirimkan shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw serta para sahabat-sahabatnya yang telah memperjuangkan Islam sebagai agama samawi sekaligus sebagai aturan hidup. Yang telah mengantarkan kita semua dari dunia perhimpunan, dunia perikatan menuju ke dunia pergerakan.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan terutama kepada Kedua orang tua terkasih dan tersayang, Ayahanda Alis dan Ibunda Nasrah semoga Allah Swt melimpahkan Ridho-Nya dan Kasih-Nya kepada keduanya. Sebagaimana dia

mendidik penulis semenjak kecil, yang atas asuhan, limpahan kasih sayang serta dorongan mereka, penulis selalu memperoleh kekuatan material dan moril dalam merintis kerasnya kehidupan .

Ucapan terima kasih juga tak lupa disampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu hingga selesainya penulisan skripsi ini, kepada:

1. Prof. Dr. Musafir Pabbari, M.Si selaku Rektor UIN Alauddin. Beserta seluruh Civitas Akademik atas bantuannya selama penulis mengikuti pendidikan.
2. Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin.
3. Prof. Dr. Achmad Abubakar, M.Ag dan Abd. Rahman Kanang, M.Pd., Ph.D selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing sampai selesainya penyusunan skripsi ini.
4. Dra. Nila Sastrawaty, M.Si selaku ketua jurusan serta Dr. Kurniati M.Ag, selaku sekretaris jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan.
5. Bapak dan Ibu dosen yang telah mencurahkan tenaga, pikiran serta bimbingannya dalam memberikan berbagai ilmu pengetahuan dalam mencari secercah cahaya Ilahi dalam sebuah pengetahuan di bangku kuliah.
6. Staf akademika dan jurusan hukum pidana dan ketatanegaraan yang telah membantu penulis hingga selesainya penulisan skripsi ini.

7. Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar Haswandy Andy Mas, S.H yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melakukan penelitian di lembaga yudisial tersebut.
8. Saudara-saudaraku yang tercinta: Muh. Jabbar, Ahmad Rijal, Nuhdia, dan sibungsu Muallim Alis yang selalu memberikan semangat dan doanya,
9. Ucapan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat seperjuanganku di HPK angkatan 2013 yaitu Rahmat Nasrul Syamint dan Asrul beserta sahabat-sahabat yang lainnya, dan seluruh sahabat-sahabatwati Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) beserta teman Kerukunan Keluarga Pelajar Mahasiswa Desa Batetangnga (KKPMB) dan kakanda-kakanda KKPMB yang telah menjadi panutan dan sebagai penyambung lidah orang tua penulis. serta kepada teman-teman yang tidak mungkin penulis sebutkan namanya satu persatu.

Akhirnya, meskipun skripsi ini telah penulis usahakan semaksimal mungkin agar terhindar dari kekeliruan dan kelemahan, baik dari segi substansi dan metodologinya, penulis dengan tangan terbuka menerima kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaan isi. Demikian semoga apa yang ditulis dalam skripsi ini diterima oleh Allah swt. sebagai amal saleh.,,Amien.

Samata-Gowa, 29 Juli 2017

Penyusun,

SULFI ALIS

NIM: 10300113200

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
ABSTRAK	xviii
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.....	13
D. Kajian Pustaka	15
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	18
 BAB II TINJAUAN TEORITIS.....	 19
A. Tinjauan Umum Lembaga Bantuan Hukum.....	19
1. Pengertian Bantuan Hukum.....	19
2. Pengertian Lembaga Bantuan Hukum	19
3. Landasan Dasar Pemberian Bantuan Hukum	21
4. Peranan LBH dalam Penanganan HAM	22
B. Tinjauan Umum Hak Asasi Manusia.....	23
1. Pengertian Hak Asasi Manusia	23
2. Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia	26
3. Landasan Dasar Hak Asasi Manusia	29

C. Pelanggaran Terhadap Hak Asasi Manusia	30
1. Bentuk-Bentuk Pelanggaran HAM.....	30
2. Bentuk Penanganan Pelanggaran HAM	34
D. LBH dan HAM dalam Pandangan Islam	37
1. Pemberian Bantuan Terhadap Korban HAM Menurut Islam	37
2. Pelanggaran HAM menurut Hukum Islam	41
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	46
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	46
B. Pendekatan Penelitian.....	47
C. Sumber Data	47
D. Metode Pengumpulan Data	49
E. Instrumen Penelitian	49
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	52
B. Upaya Penanganan oleh LBH Makassar Terhadap Pelanggaran HAM yang Terjadi di Kota Makassar.....	65
C. Pandangan Hukum Islam dalam Upaya Penanganan oleh LBH Makassar Terhadap Pelanggaran HAM yang Terjadi di Kota Makassar	72
BAB V PENUTUP.....	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Implikasi Penelitian	77
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	81
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. *Konsonan*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	Sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	Ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	x	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau menoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	A	a
اِ	<i>kasrah</i>	I	i
اُ	<i>dammah</i>	U	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	<i>fathah dan yaa'</i>	Ai	a dani
اَوَّ	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hauila*

3. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ... إ...	Fathah dan alif atau yaa'	A	A dan garis di atas
إ	Kasrah dan yaa'	I	I dan garis di atas
و	Dhammah dan waw	U	U dan garis di atas

Contoh:

مات : *maata*

رَمَى : *ramaa*

قِيلَ : *qiila*

يَمُوتُ : *yamuutu*

4. *Taa' marbuutah*

Transliterasi untuk *taa' marbuutah* ada dua, yaitu *taa' marbuutah* yang hidup atau mendapat *harakat fathah, kasrah, dan dhammah*, transliterasinya adalah [t].sedangkan *taa' marbuutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *taa' marbuutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sedang al- serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka *taa' marbuutah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh :

الرَّادَّةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al- atfal*

الْفَاضِلَةُ الْمَدِينَةُ : *al- madinah al- fadilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid(ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonang anda) yang diberi tandasyaddah.

Contoh :

رَبَّنَا : *rabbanaa*

نَجِّنَا : *najjainaa*

الْحَقُّ : *al- haqq*

نُعَمُّ : *nu"ima*

عُدُو : *'aduwwun*

Jika huruf ى ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ) maka ia ditransliterasikan sebagai huruf *maddah* menjadi i.

Contoh :

عَلِي : 'Ali (bukan 'Aliyyatau 'Aly)

عَرَبِي : 'Arabi (bukan 'Arabiyyatau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الْفَلَسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilaadu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : *ta'muruuna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Bahasa Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan telah menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata Al-Qur'an (dari *Al-Qur'an*), al-hamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh :

Fizilaal Al-Qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

9. Lafz al- Jalaalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaafilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh :

دِئَاللهِ *diinullah* بِاللهِ *billaah*

Adapun taamarbuutah di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalaalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. contoh :

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fi rahmatillaah*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ajaran Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf capital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul refrensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). contoh:

Wa ma muhammadun illaa rasul

Inna awwala baitin wudi' alinnasi lallazii bi bakkata mubarakan

Syahru ramadan al-lazii unzila fih al-Qur'an

Nazir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al- Farabi

Al-Gazali

Al-Munqiz min al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abu Al-Wafid Mummad Ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu Al-Walid Muhammad (bukan : rusyd, abu al-walid Muhammad ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah :

swt	= <i>subhanallahu wata'ala</i>
saw	= <i>sallallahu 'alaihi wasallam</i>
a.s	= <i>'alaihi al-sallam</i>
H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
I	= Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W	= Wafat Tahun
QS.../...4	= QS. Al-Baqarah/2:4 atau QS. Al-Imran/3:4
HR	= Hadis Riwayat

Untuk karya ilmiah berbahasa Arab, terdapat beberapa singkatan berikut :

ص	= صفحة
دم	= بدون مكان
صلعم	= صلى الله عليه و سلم
ط	= طبعة
دن	= بدون ناشر
الخ	= الى اخرها / الى اخره
ج	= جزء



ABSTRAK

Nama : Sulfi Alis
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Hukum Pidana dan Ketatanegaraan
NIM : 10300113200
Judul Skripsi : Peranan Lembaga Bantuan Hukum dalam Penanganan Kasus Pelanggaran HAM Ditinjau dari Hukum Islam

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan: (1) Upaya penanganan yang telah dilakukan oleh LBH Makassar terhadap pelanggaran HAM yang terjadi di Kota Makassar, dan (2) Pandangan hukum Islam terhadap penanganan pelanggaran HAM di Kota Makassar.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif (*doktrinal*) dan empiris dengan pendekatan penelitian perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan syar'i. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data ini dikumpulkan dengan menggunakan tehnik studi kepustakaan, wawancara dan dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya penanganan yang telah dilakukan LBH Makassar terhadap pelanggaran HAM yang terjadi di Kota Makassar dilakukan dengan dua jalur yaitu jalur litigasi dan non-litigasi. Jalur litigasi dilakukan dengan melakukan pendampingan terhadap masyarakat yang mengalami kasus pelanggaran HAM dalam proses persidangan. Sedangkan jalur non-litigasi dilakukan LBH Makassar dengan membangun aliansi masyarakat dan mahasiswa melalui kampanye anti pelanggaran HAM dan memberikan pendidikan hukum terhadap masyarakat serta mendorong penyusunan dan penegakan aturan terkait pelanggaran HAM yang terjadi di Kota Makassar. Adapun pandangan Hukum Islam terhadap penanganan pelanggaran HAM, bahwa Islam dengan HAM masing-masing mengedepankan kepentingan umat manusia. Hal ini sejalan yang dicontohkan Rasulullah saw yang telah mengatur kebebasan beragama dalam piagam Madinah. Dan di dalam Al-Qur'an terkait kebebasan akan beragama, juga dipertegas dalam Q.S Al-Kafirun/109:6 yang artinya "*Untukmu agamamu, dan untukkulah agamaku*".

Implikasi dari penelitian tersebut untuk memberikan pemahaman kepada pembaca bahwa ketika berurusan dengan hukum terutama pada kasus pelanggaran HAM maka seharusnya memohon bantuan hukum kepada LBH demi mendapatkan suatu pendampingan hukum yang pada akhirnya mendapatkan suatu keadilan dan kasus yang menjeratnya juga dapat diselesaikan dengan baik. Ketika masyarakat telah melakukan permohonan bantuan hukum di LBH terutama pada kasus pelanggaran HAM, maka pihak dari LBH akan berusaha untuk menyelesaikan kasus pelanggaran tersebut dengan baik, sehingga masyarakat yang melakukan permohonan bantuan hukum tersebut, disamping dapat mengetahui atau menambah wawasannya yang berkaitan dengan hukum, masyarakat juga dapat merasakan suatu keadilan hukum.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.¹ Dalam arti ini, maka meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, tetap mempunyai hak-hak. Inilah sifat universal dari HAM tersebut. Selain bersifat universal, HAM juga tidak dapat dicabut (*inalienable*). Artinya seburuk apapun perlakuan yang telah dialami oleh seseorang atau betapapun bengisnya perlakuan seseorang, tidak akan berhenti menjadi manusia dan karena itu tetap memiliki hak-hak tersebut. Dengan kata lain, hak-hak itu melekat pada dirinya sebagai makhluk insani.²

Menurut Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948, setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan dengan tidak ada pengecualian apapun seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, bahasa, politik atau pandangan lain, asal usul kebangsaan. Sedangkan, menurut

¹Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice* (Cornell University Press, Ithaca and London, 2003), h. 7-21. Juga Maurice Cranston, *What are Human Rights?*, (Taplinger, New York, 1973), h. 70. Dikutip dalam bukunya Rhona K. M. Smith, Dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia (PUSHAM) Universitas Islam Indonesia, 2008), h. 11.

²Rhona K. M. Smith, Dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia (PUSHAM) Universitas Islam Indonesia, 2008), h. 11.

Undang-Undang No. 9 Tahun 1999 Tentang HAM, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Doktrin ini berevolusi seiring dengan perkembangan sejarah manusia. Konsep HAM dianggap penting justru karena umat manusia terusik nuraninya oleh “perbuatan-perbuatan barbar” para tirani di dunia.³

DUHAM yang dideklarasikan pada 10 Desember 1948 sendiri merupakan respon komunitas internasional, khususnya para perwakilan pemerintahan di dunia saat itu, atas salah satu pengalaman paling gelap dalam sejarah umat manusia: Perang Dunia II dan fasisme yang memproduksi puluhan juta korban jiwa, semata-mata karena kebijakan yang rasis dan mengekang kebebasan fundamental. DUHAM ini dianggap merupakan salah satu cara dari komunitas internasional untuk mencegah terulangnya kembali praktek serupa di kemudian hari.⁴ Adapun karakter umum doktrin HAM :

1. Fokus pada martabat manusia (*dignity of human being*),
2. Dilindungi secara legal (*legally protected*),
3. Dijamin oleh norma-norma internasional (*internationally guaranteed*),
4. Melindungi baik entitas individual maupun kolektif,
5. Menempatkan negara (*state*) dan aparatus negara (*state actors*) sebagai pemangku kewajiban (*state responsibility*),

³Tim KontraS, *Panduan untuk Pekerja HAM: Pemantauan dan Investigasi Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan Indonesia Australia Legal Development Facility (IALDF), 2009), h. 30.

⁴Tim KontraS, *Panduan untuk Pekerja HAM: Pemantauan dan Investigasi Hak Asasi Manusia*, h. 31.

6. Tidak dapat dicabut dan diambil,
7. Asas kesetaraan (*equality*), saling berkaitan dan bergantung (*interrelated and interdependent*),
8. Asas universalitas (*universality*).⁵

Adapun contoh dalam Hak Asasi Manusia yang penulis dapat paparkan yaitu, sebagai berikut:

1. Hak untuk menentukan nasib sendiri

Hak untuk menentukan nasib sendiri merupakan hak yang istimewa karena muncul di kedua Kovenan Kembar. Berakar dari dekolonisasi, pada awalnya penentuan nasib sendiri dilihat sebagai mekanisme untuk negara agar dapat mendapatkan kemerdekaannya dari kekuatan-kekuatan kolonial.⁶

2. Hak untuk hidup

Sementara DUHAM menggabungkan hak untuk hidup dengan hak atas keamanan perorangan dan kebebasan, hampir semua instrumen yang lain membahas hak-hak tersebut secara terpisah. Dalam banyak hal, hak untuk hidup adalah unik. Tentu saja negara tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban sepenuhnya untuk memelihara dan melindungi hidup. Setiap orang akan meninggal. Terlebih lagi hak untuk hidup adalah prasyarat dasar bagi pelaksanaan dan penerimaan hak dan kebebasan lainnya. Hak dan kebebasan lainnya menambah kualitas kehidupan. Demikian pula hak untuk hidup saling bergantung pada hak dan kebebasan lainnya.⁷

3. Kebebasan menyampaikan pendapat

⁵Tim Kontras, *Panduan untuk Pekerja HAM: Pemantauan dan Investigasi Hak Asasi Manusia*, h. 31.

⁶Rhona K. M. Smith, Dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, h. 94.

⁷Rhona K. M. Smith, Dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, h. 97.

Walaupun seringkali dianggap sebagai prasyarat dasar demokrasi, elemen kebebasan menyampaikan pendapat mempunyai sejarah yang lebih panjang. Berbagai teks dan praktik zaman dahulu kala sudah melibatkan elemen elemen penyebaran informasi dan pendapat. Pasal 19 DUHAM menyatakan “Setiap orang memiliki hak atas kebebasan berpendapat dan menyampaikan pendapat. Hak ini mencakup kebebasan untuk memiliki pendapat tanpa diganggu gugat dan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi serta gagasan melalui media apa pun dan tanpa memandang pembatasan.”⁸

4. Hak beragama dan berkeyakinan

Jelas ada beberapa elemen yang merupakan kebebasan agama, pikiran dan hati nurani. Agama esensinya adalah kumpulan kepercayaan yang mengatur ketentuan-ketentuan tertentu bagi hidup. Hal itu “merupakan masalah yang sangat pribadi”. Undang-undang tidak dapat memaksa individu untuk mempercayai suatu kumpulan tertentu kepercayaan keagamaan. Namun undang-undang dapat memaksakan ketaatan terhadap beberapa praktik agama tertentu.⁹

Terkait dalam hal kebebasan beragama, agama Islam sangat menjunjung tinggi rasa toleransi beragama, sebagaimana hadis Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh shahih Al-Bukhari dalam kitab *Abwab Aljizyah wa Al-Muwaada'ah* pada bab *Itsm Man Qatala Muaahadan Bighairi Jarm* :

حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ خَفْصٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَمْرِو حَدَّثَنَا مُجَاهِدٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَ إِنَّ رِيحَهَا تُوَجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا (رواه بخارى).

Artinya:

⁸Rhona K. M. Smith, Dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, h. 101.

⁹Rhona K. M. Smith, Dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, h. 106.

Al-Bukhari berkata : Qais Ibn Hafsh telah menyampaikan kepada kami (katanya), ‘Abdul Al-Wahid telah menyampaikan kepada kami (katanya), Al-Hasan bin ‘Amru telah menyampaikan kepada kami (katanya), Mujtahid telah menyampaikan kepada kami, dari Abdullah bin ‘Amru ra. Dari Nabi saw ia bersabda : “Siapapun yang memerangi (kafir) mu’ahad, dia tidak (akan) mendapatkan wanginya surga, karena wangi surga itu dapat dijangkau dari empat puluh tahun perjalanan. (HR. Bukhari).¹⁰

Dari hadis tersebut dapat diperoleh informasi bahwa orang-orang yang *Mu’aahad* adalah pihak yang mengadakan perjanjian dengan Islam meskipun agamanya berbeda dengan agama Islam. Dalam literatur dan kajian hadis, term *Mu’aahad* lebih sering digunakan untuk *Ahl Al-Zimmah*. Kadang juga digunakan terhadap orang-orang kafir yang mengadakan rekonsiliasi (*ishlah*) tanpa melakukan perang untuk jangka waktu tertentu. Tentu saja dalam hal ini, baik *Ahl Al-Zimmah* maupun *Mu’aahad* adalah masyarakat yang harus dilindungi, sebagaimana bunyi hadis tersebut.

Menurut Fazlur Rahman bahwa Piagam Madinah itu menjamin kebebasan beragama orang Yahudi sebagai komunitas, dengan menekankan kerjasama seerat mungkin dengan kaum muslim dan menyerukan kepada orang Islam dan Yahudi agar bekerjasama demi keamanan keduanya.¹¹

Pemberian bantuan hukum adalah salah satu perwujudan dari amanat Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Undang-Undang Dasar 1945 mengualifikasikan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian

¹⁰Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari Al-Jafi, *Shahih Al-Bukhari, Juz III* (Cet. III; Beirut: Dar ibn Katsir, 1987) h. 1155.

¹¹Fazlul Rahman, *Islam, Terjemahan Ahsin Muhammad* (Bandung: Pustaka Salman, 2000), h. 12.

hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai bagian dari hak asasi manusia.¹²

Penyebutan hak dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) membawa konsekuensi tertentu, baik terhadap pengualifikasiannya maupun pihak mana yang memiliki kewajiban utama dalam pemenuhannya. Oleh karena disebutkan secara resmi dalam konstitusi, maka hak tersebut dikualifikasi sebagai hak konstitusional setiap warga negara. Sehingga pemegang kewajiban utama dalam pemenuhannya adalah negara. Jaminan terhadap hak dan kewajiban ini ditegaskan dan dijadikan landasan bagi pembentukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (selanjutnya disingkat UUBH). Dalam konsideran menimbang huruf (a) UUBH, dinyatakan bahwa negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia.¹³

Hukum berhubungan dengan manusia. Sejak lahir sampai meninggal, manusia tidak terlepas dari hukum, yang berupa aturan-aturan. Manusia, bahkan janin dalam kandungan, dapat bertindak sebagai subjek hukum, yaitu pemegang hak dan kewajiban hukum.

Dalam sistem hukum berlaku asas *factie hukum* artinya setiap orang dianggap telah mengetahui undang-undang. Konsep *rule of law*, yang

¹²Tim Kontras, *Panduan untuk Pekerja HAM: Pemantauan dan Investigasi Hak Asasi Manusia*, h. 29.

¹³Chrisbiantoro dan M Nur Sholikin Satrio Wirataru, *Bantuan Hukum Masih Sulit Diakses: Hasil Pemantauan di Lima Provinsi Terkait Pelaksanaan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum* (Jakarta: Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS], Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia [PSHK], dan Australia Indonesia Partnership for Justice [AIPJ], 2014), h. 1.

memberikan status tertinggi kepada hukum, mendalilkan tak seorangpun boleh mengingkari berlakunya hukum, setinggi apapun kedudukan dan kekuasaannya. Setiap orang, dalam hubungannya dengan orang lain, negara, dan masyarakat, hampir dipastikan akan mengalami persoalan hukum. Dalam hal ini, setiap orang berhak membela diri atau mendapatkan bantuan hukum.

Bantuan hukum merupakan upaya untuk membantu orang yang tidak mampu dalam bidang hukum. Dalam pengertian sempit, bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu.¹⁴

Orang yang mampu dan memiliki masalah hukum dapat menunjuk seseorang atau lebih advokat untuk membela kepentingannya. Demikian pula orang yang tidak mampu (miskin) dapat meminta pembelaan dari seorang atau lebih advokat untuk membela kepentingannya. Tidaklah adil jika orang miskin tidak mendapatkan pembelaan hukum karena ia tidak mampu membayar jasa advokat.

Oleh karena itu, terdapat hak atas bantuan hukum bagi orang yang tidak mampu, supaya ia mendapatkan keadilan. Hak tersebut tercantum dalam hukum dan internasional dan nasional sebagai bentuk pemenuhan HAM.

Prinsip persamaan di muka hukum merupakan salah satu prinsip HAM universal yang tercantum dalam pasal 7 DUHAM dan kovenan hak sipil dan politik (*International Covenant on Civil and Political Rights* atau disingkat ICCPR).

¹⁴YLBHI, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia* (Cet. I ; Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009), h. 33.

Pasal 16 dan 26 ICCPR menjamin persamaan kedudukan di muka hukum (*equality before the law*) semua orang berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan harus dihindarkan dari adanya diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik nasional atau asal muasal kebangsaan, kekayaan, kelahiran atau status dan sebagainya.¹⁵

Hak atas bantuan hukum merupakan *non-derogable rights*, artinya hak tersebut bersifat absolut dan tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara dalam keadaan darurat sekalipun.

Syarat-syarat untuk mendapatkan bantuan hukum menurut Pasal 14 ayat (3) ICCPR yaitu: untuk kepentingan keadilan dan tidak mampu membayar advokat. Kedua syarat itu harus dipenuhi dan bukan merupakan persyaratan alternatif. Namun, ICCPR tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan kepentingan keadilan, termasuk apakah bantuan hukum itu hanya untuk kasus pidana dan kasus perdata atau lainnya.

Role of lawyers menyebutkan setiap orang yang menghadapi tuntutan pidana berhak untuk didampingi oleh advokat atas pilihannya sendiri, untuk melindungi hak-haknya, dan untuk mendampingi dalam pembelaan. Jika orang tersebut tidak mampu membayar jasa advokat, harus ditunjuk advokat yang berkualitas baginya. Kemudian orang tersebut harus diberikan waktu yang layak dan fasilitas yang cukup untuk berkomunikasi dengan advokatnya.

¹⁵YLBHI, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, h. 33.

Kesempatan untuk memperoleh bantuan hukum harus segera dilakukan dan tidak boleh ditunda-tunda.¹⁶

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945). Prinsip dasar negara hukum ada tiga: supremasi hukum, persamaan di muka hukum, dan penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum.

Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara (Pasal 34 ayat (1) UUD 1945). Dengan demikian, negara mengakui adanya hak ekonomi, sosial, budaya, sipil, dan politik, para fakir miskin. Karena itulah, orang miskinpun berhak untuk diwakili dan dibela oleh advokat baik di dalam maupun di luar pengadilan (*legal aid*), sama seperti orang mampu yang mendapatkan jasa hukum dan advokat (*legal service*). Bantuan hukum merupakan tugas dan tanggungjawab negara dan merupakan hak konstitusional setiap warga negara.¹⁷

Jaminan mendapatkan bantuan hukum itu tercantum dalam UUD 1945, UU, serta peraturan pelaksanaannya. Dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 disebutkan “Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Kemudian dikemukakan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan lepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Lebih rinci lagi, negara menjamin untuk hak hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk

¹⁶YLBHI, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, h. 34.

¹⁷YLBHI, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, h. 34.

tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut sebagai hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (Pasal 28I ayat (2) UUD 1945).

Dalam penjelasan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 disebutkan bahwa “Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum”.¹⁸

Adapun dalam pandang hukum Islam, kerangka filosofis bantuan hukum berkaitan dengan teori penegakan hukum dan teori HAM. Teori bantuan hukum dalam HAM berakar dari tiga konsep. Pertama, konsep tentang manusia (*mafhum al-insan*), kedua, konsep tentang hak dan kewajiban (*mafhum al-huquq wa al-wajibat*), dan ketiga, konsep tentang penegakan hukum hak asasi manusia (*mafhum al-hukm fi huquq al-insan*). Ketiga konsep tersebut diduga sangat memengaruhi perbedaan konsep bantuan hukum dalam hukum Islam dan hukum barat.¹⁹

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) adalah salah satu institusi yang mengarahkan bentuk-bentuk programnya pada penguatan aspek permintaan (*justice demander*) dan aspek pemasokan (*justice provider*) dalam memberikan jasa konsultasi dan bantuan hukum. Semua program konsultasi dan bantuan hukum di LBH tersebut ditujukan dalam rangka mengimplementasikan prinsip persamaan di depan hukum (*equality before of the law*), pemenuhan hak-hak konstitusional semua individu (*to pulfiil the constitutional rights for all*), serta

¹⁸Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dikutip dalam situs www.komisiyudisial.go.id. (Diakses pada Tanggal 27 Juli 2017).

¹⁹Didi Kusnadi, *Bantuan Hukum dalam Islam: Profesi Kepengacaraan dalam Islam dan Praktiknya* (Jakarta: Pustaka Setia, 2012), h. 29.

penegakan hukum dan jaminan keadilan (*law enforcement and acces to justice for all*).²⁰

Pada tingkatan yang lebih konkret, aplikasi bantuan hukum (*acces to justice*) dalam proses penegakan hukum oleh LBH di dalam dan diluar lembaga peradilan, diprioritaskan untuk masyarakat yang termasuk dalam kategori sebagai berikut:

1. Orang miskin,
2. Warga Negara Indonesia (WNI) yang melakukan tindak pidana di luar Indonesia (Pasal 5 KUHP),
3. Terdakwa hukuman mati atau pelaku pidana lebih dari 5 tahun,
4. Pembela HAM (*Human Rights Defenders*),
5. Kasus-kasus tindak pelanggaran HAM, dan
6. Mereka yang membutuhkan rasa keadilan atau bertempat tinggal di Indonesia.²¹

Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) telah lama dikenal dalam Islam. Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia ini merupakan salah satu bentuk dari upaya penegakan keadilan. Allah swt berfirman dalam Q.S. al-Maidah /5:8, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ إِنَّ اللّٰهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. dan janganlah

²⁰Didi Kusnadi, Bantuan Hukum dalam Islam: Profesi Kepengacaraan dalam Islam dan Praktiknya, h. 33.

²¹Didi Kusnadi, Bantuan Hukum dalam Islam: Profesi Kepengacaraan dalam Islam dan Praktiknya, h. 34.

kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha Teliti apa yang kamu kerjakan.”²²

Pada dasarnya, pemberian bantuan hukum kepada para pihak yang bersengketa telah berlangsung sejak lama. Dalam catatan sejarah peradilan Islam, praktek pemberian bantuan hukum telah di kenal sejak zaman pra Islam. Pada saat itu, meskipun belum terdapat sistem peradilan yang terorganisir, setiap ada persengketaan mengenai hak milik, hak waris, dan hak-hak lainnya seringkali diselesaikan melalui bantuan juru damai atau wasit yang ditunjuk oleh masing-masing pihak yang berselisih. Mereka yang ditunjuk pada waktu itu sebagai mediator adalah orang yang memiliki kekuatan supranatural dan orang yang mempunyai kelebihan di bidang tertentu sesuai dengan perkembangan pada waktu itu.²³

Pada masa pra Islam, pemberian bantuan hukum itu harus memenuhi beberapa kualifikasi. Di antara syarat yang terpenting bagi mereka adalah harus cakap dan memiliki kekuatan supranatural. Atas dasar persyaratan tadi, pada umumnya pemberian jasa hukum itu terdiri atas ahli nujum. Karena itu, dalam pemeriksaan dan penyelesaian persengketaan di kalangan mereka lebih banyak menggunakan kekuatan firasat daripada menghadirkan alat-alat bukti, seperti saksi atau pengakuan. Pada waktu itu mereka berpraktek di tempat sederhana, misalnya di bawah pohon atau kemah-kemah yang didirikan. Setelah dibangun sebuah gedung yang terkenal di Makkah, Darul al-‘Adawah, mereka berpraktek

²²Kementerian Agama Republik Islam, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Sinergi Pustaka, 2012), h. 144.

²³Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, *Advokat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h. 36.

di tempat itu. Dalam sejarah, gedung itu dibangun oleh Qusay bin Ka'ab. Pintu gedung itu sengaja diarahkan ke Ka'bah.²⁴

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti mengangkat judul: “Peranan Lembaga Bantuan Hukum dalam Penanganan Kasus Pelanggaran HAM Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus Lembaga Bantuan Hukum Makassar)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut dan melihat masih terdapat kekurangan informasi mengenai peranan LBH, maka yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Penanganan LBH Makassar terhadap pelanggaran HAM di Kota Makassar ?” Berdasarkan dari pokok masalah tersebut, maka yang menjadi sub-sub masalah yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya penanganan kasus yang telah dilakukan LBH Makassar terhadap pelanggaran HAM yang terjadi di Kota Makassar ?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap penanganan kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Kota Makassar ?

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus Penelitian

Fokus pembahasan dalam skripsi ini adalah: peranan lembaga bantuan hukum, kasus pelanggaran HAM di Kota Makassar, serta tinjauan hukum Islam. Agar pembahasan skripsi lebih terarah dan fokus pada pembahasan, maka perlu dijelaskan atau dideskripsikan terlebih dahulu beberapa terminologi yang dapat memberikan penafsiran atau pemahaman yang keliru dari para pembaca.

2. Deskripsi Fokus

²⁴Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, *Advokat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, h. 36.

Beberapa terminologi yang perlu dideskripsikan, antara lain :

- a. Peranan; adalah hal yang besar pengaruhnya pada suatu peristiwa²⁵ atau suatu tugas pokok yang harus dijalankan sesuai aturan yang berlaku.
 - b. Lembaga Bantuan Hukum; adalah sebuah lembaga yang non profit yang didirikan dengan tujuan memberikan pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum, termasuk pemberian bantuan hukum secara gratis (cuma-cuma) bagi masyarakat yang tidak mampu, buta hukum dan tertindas,²⁶
 - c. Penanganan adalah proses, cara, perbuatan, menangani; penggarapan,²⁷
 - d. Pelanggaran Hak Asasi Manusia terdiri atas dua kata yaitu Pelanggaran dan Hak Asasi Manusia. Pelanggaran diartikan sebagai perbuatan melawan hukum yang kualitas hukumannya lebih ringan daripada kejahatan, yang ancaman pidananya tidak ada yang berupa pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda.²⁸
- Sedangkan Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum,

²⁵Kementerian Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Kementerian Pendidikan, 2008) h. 312.

²⁶Lihat: Hukum Online, *Pengertian Lembaga Bantuan Hukum*. Dikutip dalam situs <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl4206/lembaga-bantuan-hukum>. (Diakses Pada Tanggal 23 Februari 2017).

²⁷Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Ed. 3; Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 1440.

²⁸Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan* (Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta dan PuKAP-Indonesia, 2012), h. 28.

pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.²⁹ Dengan demikian, Pelanggaran Hak Asasi Manusia merupakan jenis kejahatan yang secara eksklusif berbeda dengan pelanggaran atau kejahatan pidana. Pelanggaran hak asasi manusia (*human rights violations*) adalah segala pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh aparat negara (*state actor*) lewat sebuah penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*), baik melalui tindakan langsung (*by act*) maupun dengan pembiaran (*by omission*). Pelanggaran atau kejahatan hak asasi manusia ini merupakan kegagalan negara untuk memenuhi tanggung jawab (*responsibility*) atau kewajibannya (*obligation*) di bawah hukum hak asasi manusia internasional. Pelanggaran hak asasi manusia terjadi ketika sebuah produk hukum, kebijakan, atau praktek pejabat atau aparatus negara secara sengaja melanggar, mengabaikan, atau gagal memenuhi standar hak asasi manusia normatif.³⁰

- e. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah swt dan Sunnah Rasulullah saw tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua orang yang beragama Islam.³¹

D. Kajian Pustaka

Masalah yang akan dikaji dalam skripsi ini yaitu Peranan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam Penanganan pelanggaran HAM dalam Perspektif

²⁹Tim Kontras, *Panduan untuk Pekerja HAM: Pemantauan dan Investigasi Hak Asasi Manusia*, h. 31.

³⁰Tim Kontras, *Panduan untuk Pekerja HAM: Pemantauan dan Investigasi Hak Asasi Manusia*, h. 70.

³¹Lihat Amir Syarifuddin, di kutip dalam Alaidin Koto, *Filsafat Hukum Islam* (Ed. 1; Cet. III; Jakarta: Rajawali Press, 2014), h. 26.

hukum Islam. Banyak literatur yang membahas tentang masalah ini, namun belum ada literatur yang membahas secara khusus tentang judul skripsi ini. Agar nantinya pembahasan ini lebih fokus pada pokok kajian maka dilengkapi beberapa literatur yang masih berkaitan dengan pembahasan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

Didi Kusnadi, dalam bukunya “*Bantuan Hukum dalam Islam: Profesi Kepengacaraan dalam Islam dan Praktiknya*”. Buku ini menjelaskan tentang konsep bantuan hukum dan pengacara, prinsip dan asas bantuan hukum dan pengacara, metode perumusan konsep bantuan hukum dan pengacara, bantuan hukum dan pengacara dalam kekuasaan kehakiman, tujuan bantuan hukum dan pengacara. Oleh karena itu, bantuan hukum menjadi bagian dari Hak Asasi Manusia.³² Buku ini belum spesifik membahas tentang peranan LBH dalam penanganan pelanggaran HAM, terutama jika ditinjau dari perspektif hukum Islam.

Ambo Asse dalam bukunya “*Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Nabi Muhammad saw*” buku ini memberikan pemahaman tentang hak asasi manusia dan perlindungannya dengan melakukan kajian terhadap pemahaman hadis (fiqhul hadis) dari segi teks, antarteks dan konteks yang menggunakan analisis tekstual, kontekstual, inter dan antartekstual yang menghasilkan pemahaman yang bersifat kontemporer tentang Hak Asasi Manusia dan perlindungannya.³³ Buku ini belum secara spesifik membahas peranan lembaga bantuan hukum dalam menangani kasus pelanggaran HAM, buku ini hanya membahas konsep islam terkait dengan hak asasi manusia.

³²Didi Kusnadi, *Bantuan Hukum dalam Islam: Profesi Kepengacaraan dalam Islam dan Praktiknya*, h. 5.

³³Ambo Asse, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Nabi Muhammad saw*, h. xviii.

Rhona K. M. Smith, Dkk, dalam bukunya “*Hukum Hak Asasi Manusia*”. Buku ini mencoba mengubah paradigma pengajaran hak asasi manusia, penerbitan buku ini juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan praktis para pengajar hak asasi manusia terhadap kelangkaan buku pegangan atau buku-teks yang memadai.³⁴ Buku ini tidak membahas peranan lembaga bantuan hukum dalam menangani kasus pelanggaran HAM dan tidak membahas bantuan hukum dan HAM dalam Islam.

Iwan Wahyu Pujiarto, Syafruddin Kalo, Eka Putra, dan Edy Ikhsan dalam jurnal penelitiannya “*Pelaksanaan Pemberi Bantuan Hukum Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum*”. Penelitian ini menjelaskan tentang pelaksanaan pemberian bantuan hukum yang dilihat dari peraturan yang diberlakukan (bantuan hukum proses pidana), para Pemberi Bantuan Hukum, sampai pada faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan pemberian bantuan hukum.³⁵ Buku ini tidak secara spesifik membahas peranan LBH dalam menangani kasus pelanggaran HAM dan konsep Islam terkait dengan bantuan hukum dan HAM.

Dari beberapa literatur-literatur yang telah dikemukakan, baik secara kelompok maupun perorangan. Tidak ditemukan yang membahas secara signifikan tentang persoalan yang diuraikan dalam skripsi. Meskipun ada diantaranya yang mengkaji tentang bantuan hukum dan pelanggaran HAM, namun masih bersifat umum, maka dengan itu peneliti ingin mengkaji secara mendalam tentang Peranan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam penanganan kasus pelanggaran HAM.

³⁴Rhona K. M. Smith, Dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, h. 6.

³⁵Iwan Wahyu Pujiarto, Syafruddin Kalo, Eka Putra, dan Edy Ikhsan, *USU Law Journal*, Vol.3.No.2 (Agustus 2015), h. 88.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah yang telah dipaparkan, yaitu sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan upaya penanganan yang telah dilakukan oleh LBH Makassar terhadap pelanggaran HAM yang terjadi di Kota Makassar.
- b. Untuk memahami pandangan Hukum Islam terhadap upaya penanganan yang telah dilakukan oleh LBH Makassar terhadap pelanggaran HAM yang terjadi di Kota Makassar.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan teoritis.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan teoritis, untuk menambah pengetahuan dibidang ilmu hukum khususnya hukum pidana.

b. Kegunaan praktis.

Diharapkan mampu memberikan sumbangsih terhadap perkembangan hukum di Indonesia, khususnya mengenai pemeriksaan setempat dalam hukum pidana serta dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi pemerintah agar lebih memperhatikan penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam penegakan hukum.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Tinjauan Umum Lembaga Bantuan Hukum

1. Pengertian bantuan hukum.

Dari segi bahasa, dalam bahasa Inggris, istilah bantuan hukum dikenal dengan *legal aid* atau *legal services*. Keduanya mengandung makna sebagai jasa hukum yang diberikan oleh advokat atau pengacara kepada kalangan masyarakat pencari keadilan (*everyone who are looking for justice*). Lebih dari itu, bantuan hukum dengan segala bentuknya, juga merupakan representasi dari akses mendapatkan keadilan (*access to justice*) dalam konteks semua orang sama dengan kedudukannya di depan hukum (*equality before the law*).¹

Kemudian, dalam praktik penegakan hukum di pengadilan (*litigation*), bantuan hukum juga terkait dengan profesi kepengacaraan atau advokat. Dalam bahasa Inggris, advokat merupakan kata benda (*noun*), yaitu “orang yang berprofesi memberikan jasa konsultasi hukum dan bantuan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan” yang kini populer dengan sebutan pengacara (*lawyer*). Pada awalnya, profesi advokat atau pengacara sarat dengan idealisme karena ia merupakan profesi mulia (*officium nobile*) dan pemberi jasa bantuan hukum cuma-cuma (*prodeo*). Akan tetapi, dalam perkembangan kemudian, ia beralih menjadi suatu pekerjaan profesional yang mendapatkan *fee* atau *honorarium* dari klien.²

2. Pengertian lembaga bantuan hukum.

Lembaga Bantuan Hukum merupakan tempat pembela publik menerima pengaduan masyarakat. Pembela publik yaitu perorangan, baik sarjana hukum

¹Didi Kusnadi, *Bantuan Hukum dalam Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h. 47.

²Didi Kusnadi, *Bantuan Hukum dalam Islam*, h. 48.

maupun advokat karena fungsi bantuan hukum merupakan salah satu aspek dari profesi advokat.³

Selain LBH-LBH yang merupakan bagian dari yang YLBHI, kini juga hadir lembaga-lembaga bantuan hukum lain yang didirikan oleh elemen-elemen masyarakat, organisasi keagamaan, fakultas hukum, bahkan partai politik. LBH yang berbentuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) antara lain LBH Kesehatan, LBH Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (APIK), dan LBH Pers. Sesuai namanya, LBH tersebut mengkhususkan pada kasus-kasus yang sesuai dengan sasaran penerimaan bantuan hukum. Contoh, LBH APIK khusus memberikan bantuan pada perempuan, LBH Kesehatan khusus untuk memberikan hukum untuk kasus pelanggaran hak atas kesehatan. Terdapat pula LSM yang tidak menamakan diri LBH tetapi memiliki visi dan misi yang serupa untuk memberikan bantuan hukum antara lain Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI).

Dalam perkembangannya ada LBH yang sungguh-sungguh memberi bantuan hukum. Namun, ada juga yang kedok belaka, artinya mendirikan LBH hanya sebagai salah satu cara untuk mendapatkan dukungan berbagai lapisan masyarakat. Setelah itu disalahgunakan untuk tujuan-tujuan yang lebih subjektif. Sehingga banyak LBH-LBH yang konsepnya jauh berbeda dari konsep yang dikembangkan oleh YLBHI.⁴ Enis-jenis bantuan hukum di Indonesia yaitu :

1. Bantuan hukum konvensional.

Tanggungjawab moral maupun profesional para advokat, sifatnya individual, pasif, terbatas pada pendekatan formal atau legal dan bentuk bantuan hukum berupa pendampingan kasus dan pembelaan di pengadilan.

³YLBHI, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, (Cet. I ; Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009) h. 46.

⁴YLBHI, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, h. 47.

2. Bantuan hukum konstitusional.

Bantuan untuk masyarakat miskin yang dilakukan dalam kerangka usaha-usaha dan tujuan yang lebih luas dari sekedar pelayanan hukum di pengadilan. Berorientasi pada perwujudan negara hukum yang berlandaskan prinsip-prinsip demokrasi dan HAM. Bantuan hukum adalah kewajiban dalam kerangka untuk menyadarkan mereka sebagai subyek hukum yang mempunyai hak yang sama dengan golongan lain. Sifat aktif, tidak terbatas pada individu dan tidak terbatas formal legal.

3. Bantuan hukum struktural.

Bantuan hukum bukanlah sekedar perlembagaan pelayanan hukum buat si miskin tetapi merupakan sebuah gerakan dari rangkaian gerakan dan rangkaian tindakan guna pembebasan masyarakat dari belenggu struktural politik, ekonomi, sosial dan budaya yang sarat dengan penindasan. Adanya pengetahuan dan pemahaman masyarakat miskin tentang kepentingan-kepentingan bersama mereka. Adanya pengertian bersama di kalangan masyarakat miskin tentang perlunya kepentingan-kepentingan mereka dilindungi oleh hukum. Adanya pengetahuan dan pemahaman di kalangan masyarakat miskin tentang hak-hak mereka yang telah diakui oleh hukum, adanya kecakapan dan kemandirian di kalangan masyarakat miskin untuk mewujudkan hak-hak dan kepentingan-kepentingan mereka di dalam masyarakat.⁵

3. Landasan Dasar Pemberian Bantuan Hukum

Apabila dilihat dari materi yang ada, baik yang bersumber dari hukum zaman kolonial maupun setelah masa kemerdekaan, tampaknya pemberian jasa bantuan hukum yang dilakukan oleh advokat masih jauh dari yang diharapkan. Sekalipun demikian, Frans Hendra Winarta sebagaimana dikutip oleh Rahmat

⁵YLBHI, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, h. 46.

Rosyadi dan Sri Hartini dalam bukunya advokat dalam perspektif Islam dan hukum positif menjelaskan bahwa perihal bantuan hukum termasuk di dalamnya prinsip *equality before the law* dan *access to legal counsel*, dalam hukum positif Indonesia telah diatur secara jelas dan tegas melalui berbagai peraturan dan perundang-undangan.

Pemberian jasa bantuan hukum ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, misalnya:

‘Pasal 27 ayat 1, menegaskan bahwa: “Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya.” Selanjutnya Pasal 34, menyatakan bahwa : “Fakir miskin dan anak terlantar merupakan tanggung jawab negara”⁶

Selain dasar hukum itu, seperti dijelaskan oleh Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, hingga saat ini belum ada ketentuan lainnya setingkat undang-undang khusus yang mengatur keberadaan advokat sebagai pemberi jasa hukum atau bantuan hukum.⁷

4. Peranan LBH dalam Penanganan HAM

Salah satu prinsip HAM adalah perlakuan sama di muka hukum (*equality before the law*). Namun, prinsip ini seringkali dilanggar karena berbagai alasan, seperti status sosial dan ekonomi seseorang. Oleh karena itu, prinsip persamaan di muka hukum harus diimbangi dengan prinsip persamaan perlakuan (*equal treatment*). Orang yang mampu dan memiliki masalah hukum dapat menunjuk seorang atau lebih advokat untuk membela kepentingannya. Demikian pula orang yang tidak mampu (miskin) dapat meminta pembelaan dari seorang atau lebih advokat untuk membela kepentingannya. Tidaklah adil jika orang miskin tidak mendapatkan pembelaan hukum karena ia tidak mampu membayar jasa advokat.

⁶Pasal 27 dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945.

⁷Didi Kusnadi, *Bantuan Hukum dalam Islam*, h. 152.

Oleh karena itu, terdapat hak atas bantuan hukum bagi orang yang tidak mampu, supaya ia mendapatkan keadilan. Hak tersebut tercantum dalam hukum internasional dan nasional sebagai bentuk pemenuhan HAM.⁸

B. Tinjauan Umum Hak Asasi Manusia

1. Pengertian Hak Asasi Manusia.

Menurut bahasa, hak asasi manusia terdiri dari tiga kata, yakni: “hak” berarti benar, milik, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu. Hak juga berarti (1) sesuatu yang benar (2) kepunyaan atau milik (3) kewenangan (4) kekuasaan untuk melakukan sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang atau peraturan lain (5) kekuasaan yang benar untuk menuntut sesuatu atau kekuasaan yang benar atas sesuatu “asasi” berarti bersifat dasar, pokok tindakan itu melanggar hak manusia. Hak asasi berarti hak yang dasar atau pokok bagi setiap individu seperti hak hidup dan hak mendapat perlindungan serta hak-hak lain yang sesuai “manusia” berarti orang atau makhluk yang berlaku budi. Sedangkan menurut istilah HAM merupakan statemen empat dasar hak dan kewajiban yang fundamental bagi seluruh manusia yang ada di permukaan bumi ini, baik laki-laki maupun wanita tanpa membedakan ras, keturunan, bahasa, maupun agama.⁹

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa pencipta hak-hak yang kodrati. Oleh karenanya, tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Meskipun demikian, bukan berarti manusia dengan hak-haknya itu dapat berbuat semau-maunya. Sebab apabila seseorang dapat dikategorikan memperkosa hak asasi orang lain, maka ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pada hakekatnya hak asasi

⁸YLBHI, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, h. 33.

⁹Kurniati, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Pidana Islam* (Cet. I; Makassar: Alauddin Press, 2011), h. 19.

manusia terdiri dari dua hak dasar yang paling fundamental, ialah persamaan dan hak kebebasan. Dari kedua hak dasar inilah lahir hak yang lainnya atau tanpa kedua hak dasar ini hak asasi manusia lainnya sulit akan ditegakkan. Hak asasi manusia dalam pengertian modern adalah wewenang yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atas sesuatu tertentu dan nilai tertentu. Dengan demikian, hak asasi manusia adalah suatu hak melekat yang dimiliki oleh setiap manusia untuk dinikmati, guna mencapai harkat kemanusiaan.¹⁰

Hak asasi manusia (HAM) adalah hak dasar yang diakui secara universal dan melekat pada diri manusia sejak kelahirannya. Setiap manusia memiliki hak itu atas kodrat kelahirannya sebagai manusia, bukan karena pemberian oleh suatu organisasi kekuasaan. Hak itu tidak boleh sesaatpun dirampas atau dicabut.

Salah satu wacana yang paling hangat dalam masa dua dekade terakhir adalah konflik antara dua “ideologi” yang berbeda dalam penerapan hak asasi manusia dalam skala nasional, yaitu universalisme (*universalism*) dan relativisme budaya (*cultural relativism*). Di satu sisi, universalisme menyatakan bahwa akan semakin banyak budaya “primitif” yang pada akhirnya berkembang untuk kemudian memiliki sistem hukum dan hak yang sama dengan budaya Barat. Relativisme budaya, di sisi lain, menyatakan sebaliknya, yaitu bahwa suatu budaya tradisional tidak dapat diubah.¹¹ Berikut ini adalah pembahasan lebih lanjut tentang dua ‘ideologi’ tersebut, yaitu:

a. Teori universalis (*Universalist Theory*) Hak Asasi Manusia

Doktrin kontemporer hak asasi manusia merupakan salah satu dari sejumlah perspektif moral universalis. Asal muasal dan perkembangan hak asasi manusia tidak dapat terpisahkan dari perkembangan universalisme nilai

¹⁰Kurniati, *Hak Asasi Manusia dalam Pespektif Hukum Pidana Islam*, h. 23.

¹¹Rhona K. M. Smith, Dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Cet. I; Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2008), h. 18.

moral. Sejarah perkembangan filosofis hak asasi manusia dapat dijelaskan dalam sejumlah doktrin moral khusus yang, meskipun tidak mengekspresikan hak asasi manusia secara menyeluruh, tetap menjadi prasyarat filosofis bagi doktrin kontemporer. Hal tersebut mencakup suatu pandangan moral dan keadilan yang berasal dari sejumlah domain pra-sosial, yang menyajikan dasar untuk membedakan antara prinsip dan kepercayaan yang “benar” dan yang “konvensional”. Prasyarat yang penting bagi pembelaan hak asasi manusia di antaranya adalah konsep individu sebagai pemikul hak “alamiah” tertentu dan beberapa pandangan umum mengenai nilai moral yang melekat dan adil bagi setiap individu secara rasional.¹²

b. Teori relativisme budaya (*Cultural Relativism Theory*)

Isu relativisme budaya (*cultural relativism*) baru muncul menjelang berakhirnya Perang Dingin sebagai respon terhadap klaim universal dari gagasan hak asasi manusia internasional. Gagasan tentang relativisme budaya mendalilkan bahwa kebudayaan merupakan satu-satunya sumber keabsahan hak atau kaidah moral. Karena itu hak asasi manusia dianggap perlu dipahami dari konteks kebudayaan masing-masing negara. Semua kebudayaan mempunyai hak hidup serta martabat yang sama yang harus dihormati. Berdasarkan dalil ini, para pembela gagasan relativisme budaya menolak universalisasi hak asasi manusia, apalagi bila ia didominasi oleh satu budaya tertentu.¹³

c. Memadukan universalisme dengan pluralisme.

Telah diakui secara umum bahwa dalam prakteknya hak asasi manusia dikondisikan oleh konteks sejarah, tradisi, budaya, agama, dan politik-ekonomi yang sangat beragam. Tetapi dengan segala keberagaman tersebut, tetap

¹²Rhona K. M. Smith, Dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, h. 19.

¹³Rhona K. M. Smith, Dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, h. 20.

terdapat nilai-nilai universal yang berpengaruh. Martabat manusia, kebebasan, persamaan dan keadilan merupakan sebagian nilai yang mengesampingkan perbedaan dan merupakan milik kemanusiaan secara utuh. Lepas dari adanya berbagai perdebatan, universalitas dan keterkaitan (*indivisibility*) hak asasi manusia merupakan bagian dari warisan kemanusiaan yang dinikmati umat manusia di masa sekarang.¹⁴

2. Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia

a. Prinsip kesetaraan.

Hal yang sangat fundamental dari hak asasi manusia kontemporer adalah ide yang meletakkan semua orang terlahir bebas dan memiliki kesetaraan dalam hak asasi manusia.

1) Definisi dan Pengujian Kesetaraan

Kesetaraan mensyaratkan adanya perlakuan yang setara, di mana pada situasi sama harus diperlakukan dengan sama, dan dengan perdebatan, di mana pada situasi yang berbeda diperlakukan dengan berbeda pula.¹⁵

2) Tindakan Afirmatif atau Diskriminasi Positif

Masalah muncul ketika seseorang berasal dari posisi yang berbeda tetapi diperlakukan secara sama. Jika perlakuan yang sama ini terus diberikan, maka tentu saja perbedaan ini akan terjadi terus menerus walaupun standar hak asasi manusia telah ditingkatkan. Karena itulah penting untuk mengambil langkah selanjutnya guna mencapai kesetaraan. Tindakan afirmatif mengizinkan negara untuk memperlakukan secara lebih kepada kelompok tertentu yang tidak terwakili. Misalnya, jika seorang laki-laki dan perempuan dengan kualifikasi dan pengalaman yang sama melamar untuk pekerjaan yang sama, tindakan afirmatif dapat dilakukan dengan mengizinkan perempuan untuk diterima hanya dengan

¹⁴Rhona K. M. Smith, Dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, h. 23.

¹⁵Rhona K.M. Smith dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, h. 39.

alasan karena lebih banyak laki-laki yang melamar di lowongan pekerjaan tersebut daripada perempuan. Contoh lain, beberapa negara mengizinkan masyarakat adat untuk mengakses pendidikan yang lebih tinggi dengan berbagai kebijakan yang membuat mereka diperlakukan secara lebih (*favourable*) dibandingkan dengan orang-orang non adat lainnya dalam rangka untuk mencapai kesetaraan. Contoh yang lebih detil dapat dilihat pada Pasal 4 CEDAW dan Pasal 2 CERD. Catatannya adalah bahwa tindakan afirmatif hanya dapat digunakan dalam suatu ukuran tertentu hingga kesetaraan itu dicapai. Namun ketika kesetaraan telah tercapai, maka tindakan ini tidak dapat dibenarkan lagi.

b. Prinsip diskriminasi.

Pelarangan terhadap diskriminasi adalah salah satu bagian penting prinsip kesetaraan. Jika semua orang setara, maka seharusnya tidak ada perlakuan yang diskriminatif (selain tindakan afirmatif yang dilakukan untuk mencapai kesetaraan).

1) Definisi dan Pengujian Diskriminasi

Apakah diskriminasi itu? Pada efeknya, diskriminasi adalah kesenjangan perbedaan perlakuan dari perlakuan yang seharusnya sama/setara.

2) Diskriminasi Langsung dan Tidak Langsung

Diskriminasi langsung adalah ketika seseorang baik langsung maupun tidak langsung diperlakukan dengan berbeda (*less favourable*) daripada lainnya. Diskriminasi tidak langsung muncul ketika dampak dari hukum atau dalam praktek hukum merupakan bentuk diskriminasi, walaupun hal itu tidak ditujukan untuk tujuan diskriminasi. Misalnya, pembatasan pada hak kehamilan jelas akan berpengaruh lebih besar kepada perempuan daripada kepada laki-laki.

3) Alasan Diskriminasi

Hukum hak asasi manusia internasional telah memperluas alasan diskriminasi. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyebutkan beberapa alasan diskriminasi antara lain ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau opini lainnya, nasional atau kebangsaan, kepemilikan akan suatu benda (*property*), kelahiran atau status lainnya. Semua hal itu merupakan alasan yang tidak terbatas dan semakin banyak pula instrument yang memperluas alasan diskriminasi termasuk di dalamnya orientasi seksual, umur dan cacat tubuh.

c. Kewajiban Positif untuk Melindungi Hak-Hak Tertentu

Menurut hukum hak asasi manusia internasional, suatu Negara tidak boleh secara sengaja mengabaikan hak-hak dan kebebasan-kebebasan. Sebaliknya negara diasumsikan memiliki kewajiban positif untuk melindungi secara aktif dan memastikan terpenuhinya hak-hak dan kebebasan-kebebasan.¹⁶

1) Arti

Untuk kebebasan berekspresi, sebuah negara boleh memberikan kebebasan dengan memberikan sedikit pembatasan. Satu-satunya pembatasan adalah suatu hal yang secara hukum disebut sebagai pembatasan-pembatasan (sebagaimana akan didiskusikan di bawah ini). Untuk hak untuk hidup, negara tidak boleh menerima pendekatan yang pasif. Negara wajib membuat aturan hukum dan mengambil langkah-langkah guna melindungi hak-hak dan kebebasan-kebebasan secara positif yang dapat diterima oleh negara. Karena alasan inilah, maka negara berkewajiban membuat aturan hukum yang melarang pembunuhan untuk mencegah aktor non negara (*non state actor*) melanggar hak untuk hidup. Penekanannya adalah bahwa negara harus bersifat proaktif dalam menghormati hak untuk hidup dan bukan bersikap pasif.

¹⁶Rhona K.M. Smith dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, h. 40.

2) Beberapa Contoh

Di antara beberapa contoh yang paling umum adalah hak untuk hidup dan pelarangan penyiksaan. Negara tidak boleh mengikuti kesalahan negara lain yang melanggar ketentuan hak untuk hidup atau melanggar larangan penyiksaan. Negara tidak boleh membantu negara lain untuk menghilangkan nyawa seseorang atau melanggar larangan penyiksaan. Sebagaimana telah didiskusikan sebelumnya, hal ini memunculkan masalah bagi suatu negara ketika mempertimbangkan untuk menolak mengakui status pengungsi, mendeportasi orang-orang non nasional ataupun menyetujui permintaan ekstradiksi.¹⁷

3. Landasan Dasar Hak Asasi Manusia.

Sepanjang sejarah, Indonesia telah memiliki empat konstitusi yang berbeda karena dipengaruhi kondisi politik pada saat itu yaitu UUD 1945, UUD RIS 1949, UUD sementara 1950, dan kembali pada UUD 1945 melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Selama periode 1999-2002, MPR telah mengamandemen UUD 1945 sebanyak empat kali. Amandemen tersebut antara lain mencakup ketentuan mengenai kedaulatan, negara hukum, masuknya wewenang lembaga negara baru seperti DPD, KY, MK, pembatasan masa jabatan presiden, rumusan baru tentang pertahanan dan keamanan, dan pencantuman HAM.¹⁸

Khusus di bidang HAM, UUD 1945 amandemen ke-IV memberikan jaminan hak asasi jauh lebih luas dari perumusan awal UUD 1945 sebelumnya, yang dapat dilihat di bawah ini :¹⁹

¹⁷Rhona K.M. Smith dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, h. 41.

¹⁸Simon Pattiradjawane, *Mengenal Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi dan Undang-Undang*, (Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 2014) h. 7.

¹⁹Simon Pattiradjawane, *Mengenal Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi dan Undang-Undang*, h. 8.

- a. Pasal 27 ayat (1): segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum (equality before the law) dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
- b. Pasal 27 ayat (2): hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- c. Pasal 28A: hak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya.
- d. Pasal 28D ayat (1): Hak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Selain HAM berupa hak yang dijamin dalam konstitusi, terdapat HAM berupa kewajiban menghargai hak orang dan pihak lain yang tercantum dalam pasal 28J ayat (1), (2) UUD 1945, amandemen UUD 1945 memperkuat inisiatif awal pengintegrasian beberapa peraturan perundang-undangan sebestinya yaitu UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.²⁰

C. Pelanggaran Terhadap Hak Asasi Manusia

1. Bentuk-Bentuk Pelanggaran HAM

Jika merunut pada terbentuknya pemerintahan Orde Baru, sedikitnya ada empat phase catatan peristiwa pelanggaran hak asasi manusia, yakni phase pembasmian orang-orang kiri dan nasionalis, pembasmian organisasi-organisasi Islam penentang asas tunggal Pancasila, pembunuhan dan penahanan tokoh masyarakat penentang kebijakan pembangunan Orde Baru dan perang kotor Republik Indonesia di Aceh, Papua, dan Timor Lorosae.

Dimulai dari tindak pembasmian pengurus, anggota, simpatisan organisasi Partai Komunis Indonesia dan orang-orang nasionalis pada 1965-1970. Dengan tuduhan memberontak terhadap pemerintah Republik Indonesia yang sah, Suharto yang kala itu belum menjadi presiden mengerahkan kekuatan militer untuk menangkap orang-orang kiri dan nasionalis, membunuh para Jenderal TNI Angkatan Darat, termasuk disini memprovokasi organisasi kemasyarakatan

²⁰Simon Pattiradjawane, *Mengenal Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi dan Undang-Undang*, h. 13.

berbasis agama dan politik tertentu untuk ikut melakukan kekerasan dan pembunuhan.

Selain itu, perempuan dan anak-anak dijadikan sebagai target antara dalam menangkap orang-orang utama yang mereka cari. Tidak sedikit para perempuan dan anak-anak yang menjadi korban dari praktik-praktik perkosaan, perbudakan seksual, dan pelecehan seksual. Ironisnya peristiwa ini tidak pernah dianggap sebagai peristiwa kejahatan hak asasi manusia karena pemerintahan pasca Orde Baru belum pernah menggelar penyelidikan atas peristiwa ini.

Bahkan beberapa pejabat dari pemerintahan reformasi masih mencoba membenarkan praktik kekerasan dan kejahatan hak asasi manusia pada peristiwa 1965 itu sebagai peristiwa kekerasan komunal.²¹

Pasca peristiwa 1965 ini menjadi titik awal atas praktik kontrol pemerintahan Orde Baru terhadap penduduknya, dimana penduduk dilarang untuk terlibat aktif dalam kegiatan politik yang bertentangan dengan kebijakan negara.

Hal lain yang juga perlu dicatat bahwa peristiwa ini kemudian juga melahirkan kontrol yang luar biasa terhadap aktivitas politik, ekonomi, sosial, dan budaya perempuan. Peristiwa ini menjadi pembenar bagi negara untuk menutup akses keterlibatan perempuan dalam kehidupan ekonomi, sosial, politik, dan budaya.

Setelah pembantaian dan pemenjaraan tanpa proses hukum atas orang-orang kiri dan nasionalis, peristiwa pelanggaran atau kejahatan hak asasi manusia berlanjut dengan operasi militer untuk menghabisi organisasi-organisasi Islam yang menentang kebijakan penyatuan ideologi bangsa yakni Pancasila pada 1971-

²¹Tim kontraS, *Panduan untuk Kerja HAM : Pemantauan dan Investigasi Hak Asasi Manusia*, (Jakarta : KontraS, 2009) h. 80.

1984. Pemerintahan Orde Baru mengatakan bahwa organisasi-organisasi yang menentang asas tunggal Pancasila sebagai kelompok pemberontak.

Pemerintahan Orde Baru melalui kekuatan militernya, yakni Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (KOPKAMTIB), menangkap pimpinan, anggota, dan simpatisan organisasi-organisasi Islam. Selanjutnya para tahanan tersebut dijebloskan ke penjara tanpa proses peradilan yang adil. Beberapa diantaranya bahkan dijatuhi hukum mati. Di sejumlah daerah, para istri dan anak-anak dari orang-orang yang dicari militer atau polisi juga kerap menjadi sasaran operasi guna memaksa orang-orang yang dicari mau menyerahkan diri. Selama dalam penyanderaan, para istri dan anak-anak mendapatkan perlakuan kejam dan tak jarang menjadi obyek pelecehan seksual.

Pasca peristiwa ini, Orde Baru melarang organisasi-organisasi Islam menggunakan tempat-tempat ibadah sebagai tempat mendiskusikan persoalan-persoalan ekonomi dan politik. Ancaman ini terbukti ketika Orde Baru kembali mengerahkan aparat militernya untuk menghancurkan organisasi-organisasi berbasis Islam yang masih membicarakan persoalan ekonomi politik di tempat pengajian di Tanjung Priok dan Talangsari. Ratusan orang tewas dan hilang dalam kedua peristiwa itu. Beberapa lainnya ditangkap dan dihukum penjara lebih dari 10 tahun.²²

Catatan tindak pelanggaran dan kejahatan hak asasi manusia lain dari Orde Baru adalah praktik-praktik pembunuhan dan penangkapan tokoh-tokoh masyarakat yang menentang praktek pembangunan di pelbagai daerah seperti penyerangan dan penahanan petani Cimacan oleh tentara dan polisi di Jawa Barat, pembunuhan Soeleman Nari di Papua, pengusiran dan penangkapan tokoh-tokoh

²²Tim kontraS, *Panduan untuk Kerja HAM : Pemantauan dan Investigasi Hak Asasi Manusia*, h. 81.

masyarakat Kedung Ombo, serta penangkapan tokoh-tokoh adat di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku.

Dengan dalih mendorong percepatan pembangunan, tentara atau polisi menangkap, membunuh atau memenjarakan penduduk yang mempertahankan rumah, hutan adat, dan tanah adat mereka dari praktik perampasan oleh militer dan polisi atau pengaman swasta perusahaan.

Praktik pelanggaran hak asasi manusia ini dilakukan untuk kepentingan pembangunan proyek mercusuar, hak pengusaha hutan atau perkebunan, maupun situs-situs ekonomi lainnya. Tidak diketahui persis berapa jumlah korban dalam peristiwa semacam ini karena belum ada laporan investigasi yang mengungkapkannya.

Selain tiga catatan di atas, tindak pelanggaran hak asasi manusia lain yang melibatkan Orde Baru adalah praktik-praktik pembasmian orang-orang sipil anggota atau simpatisan pro kemerdekaan di Aceh, Papua, dan Timor Lorosae. Tuduhan terhadap orang-orang sipil itu adalah melakukan makar. Tentara dan polisi menangkap, menculik, membunuh, dan memenjarakan orang-orang sipil anggota atau simpatisan kelompok pro kemerdekaan.

Dalam upaya mereka mengungkap gerakan perlawanan bawah tanah, tim-tim rahasia militer dan polisi kerap menjadikan perempuan dan anak-anak sebagai target sasaran tindak kejahatan seperti perkosaan, pelecehan seksual, dan penyanderaan-penyanderaan. Praktek-praktek kotor ini terus mereka gunakan selain untuk mengungkap jaringan bawah tanah, juga sebagai hukuman jika para gerilyawan menyerang patroli tentara atau polisi. Jumlah korban dari setiap peristiwa ini dapat dilihat dari laporan-laporan resmi yang telah dipublikasikan oleh Komnas HAM dan khusus untuk Timor Leste dapat di lihat dalam laporan

akhir CAVR (*The Commission for Reception, Truth and Reconciliation in East Timor*) dan Komisi Kebenaran Persahabatan (KKP).²³

2. Bentuk Penanganan Pelanggaran HAM.

Prinsip-prinsip dasar PBB bagi penghapusan impunitas meliputi keseluruhan aspek dan dimensi serta mekanisme penting bagi penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia dengan empat pilar penting yaitu: a). Hak atas keadilan (*right to justice*); b). Hak atas kebenaran (*right to truth*); c). Hak atas reparasi (*right to reparation*); dan d). Jaminan ketidakberulangan (*guarantees of non-recurrence*). Pilar terakhir meminta negara untuk melakukan reformasi kelembagaan untuk mencegah terulangnya pelanggaran hak asasi manusia yang sistematis atau meluas pada masa depan.

Seluruh pilar tersebut berdiri di atas prinsip umum yaitu kewajiban negara untuk mengambil langkah yang efektif dalam memerangi impunitas. Impunitas muncul karena kegagalan negara dalam memenuhi kewajiban mereka untuk menyelidiki, mengambil langkah yang tepat dengan menjamin siapa pun pelakunya dituntut dan dibawa ke pengadilan dan dihukum, menyediakan langkah pemulihan bagi korban, menjamin terpenuhinya hak atas kebenaran yang tak dapat dicabut milik korban serta mengambil langkah untuk menjamin ketidakberulangan. Adapun penjelasan dari keempat pilar tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pilar Pertama: Hak atas Kebenaran

Pilar pertama yaitu hak atas kebenaran memiliki beberapa prinsip umum yaitu:

²³Tim kontraS, *Panduan untuk Kerja HAM : Pemantauan dan Investigasi Hak Asasi Manusia*, h. 82.

1) Hak atas kebenaran yang tidak dapat dicabut

Bahwa setiap orang memiliki hak yang tak dapat dicabut yaitu hak atas kebenaran atas pelanggaran hak asasi manusia, keadaan dan alasan yang menyebabkan terjadinya pelanggaran yang meluas atau sistematis. Pemenuhan hak atas kebenaran secara menyeluruh akan dapat menjadi sebuah benteng vital bagi tidak terjadinya pelanggaran serupa.

2) Tugas negara untuk merawat ingatan.

Negara memiliki tugas untuk merawat arsip dan bukti-bukti dengan tujuan untuk merawat ingatan kolektif atas pelanggaran yang terjadi.

3) Hak korban atas kebenaran.

Korban memiliki hak untuk tahu atas apa yang terjadi dan keadaan yang melingkupinya juga nasib korban.

4) Jaminan adanya langkah dilaksanakannya hak atas kebenaran

Negara harus mengambil langkah agar hak atas kebenaran terwujud melalui langkah yudisial atau pun non yudisial di mana keduanya saling melengkapi.

Prinsip ini juga memiliki prinsip-prinsip penting lainnya, misalnya: a). prinsip yang mengatur tentang pembentukan komisi untuk pengungkapan kebenaran, jaminan independensi, imparialitas, dan kompetensi, masa kerja komisi, hak korban untuk memberi kesaksian, sumber daya yang cukup, serta publikasi laporan mereka; b). Merawat akses dan arsip yang juga memuat prinsip adanya kerja sama antara lembaga arsip dengan pengadilan dan komisi non-yudisial, langkah khusus terkait arsip yang memuat nama-nama serta langkah khusus terkait restorasi menuju demokrasi atau perdamaian.

b. Pilar Kedua: Hak atas Keadilan

Pilar kedua memuat prinsip umum yaitu tugas negara untuk melakukan penyelidikan yang cepat, menyeluruh, independen dan juga imparial atas pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran hukum humaniter dan mengambil langkah tepat berkaitan dengan pelaku utamanya dalam ranah pidana di mana para pelaku yang diduga bertanggungjawab atas terjadinya tindak pidana serius berdasar hukum internasional dituntut, diadili dan dihukum. Meskipun putusan untuk melakukan penuntutan atas pelaku utamanya bersandar pada kompetensi negara, namun korban dan keluarga serta anak turunannya harus dapat menggugat apakah secara individual atau kolektif utamanya gugatan perdata. Negara harus menjamin adanya legal standing dalam proses hukum bagi pihak yang memiliki kepentingan yang legitimate terkait pelanggaran yang terjadi.

Pilar kedua juga memuat beberapa prinsip penting terkait dengan pembagian yurisdiksi pengadilan nasional dan internasional. Pilar kedua juga memuat prinsip penguatan dan peningkatan efektifitas prinsip hukum internasional terkait dengan yurisdiksi internasional dan universal. Selain itu prinsip ini juga memuat beberapa prinsip mendasar antara lain, prinsip tidak adanya pemberian amnesti dan suaka bagi pelaku kejahatan internasional. Selain itu pilar kedua juga memuat prinsip tidak diperbolehkannya menuruti perintah atasan atau komandan alasan tidak dituntutnya seorang pelaku. Prinsip penting lain adalah dibatasinya peradilan militer hanya untuk tindak pidana militer oleh personil militer yang dalam hal ini harus berada di bawah pengawasan peradilan umum. Prinsip ini juga memuat prinsip jaminan independensi hakim dan peradilan.

- c. Pilar ketiga: Hak atas Reparasi dan Pilar keempat: Jaminan Ketidakberulangan.

Pilar ini memuat prinsip umum bahwa pelanggaran hak asasi manusia menerbitkan adanya hak korban atau pun keluarganya atas pemulihan. Hal ini memberi implikasi adanya kewajiban dan tugas di pundak negara untuk memberikan pemulihan kepada korban atau pun keluarganya serta kemungkinan bagi korban untuk mencari pemulihan dari pelaku.

Dalam hal ini negara harus menjamin adanya prosedur bagi korban untuk menuntut pemulihan serta mempublikasikannya. Reparasi sendiri harus mencakup restitusi, kompensasi, rehabilitasi serta “*satisfaction*” sebagaimana diatur oleh hukum internasional. Pilar ini juga memuat jaminan ketidakberulangan yang memuat prinsip umum bahwa negara harus menjamin harus melakukan reformasi kelembagaan dan langkah-langkah lain yang diperlukan untuk menjamin adanya penghormatan terhadap *rule of law*, mempercepat dan menjaga budaya penghormatan terhadap hak asasi manusia serta membangun kembali kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah dan lembaga negara.²⁴

D. LBH dan HAM dalam Pandangan Islam

1. Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Korban HAM Menurut Islam,

Meskipun secara kelembagaan advokat belum dikenal di kalangan orang-orang Arab pra Islam, tetapi ada praktek yang berlaku saat itu ketika terjadi sengketa antara mereka yaitu mewakilkan atau menguasai seorang pembicara atau juru debat yang disebut *hajj* atau *hijaj* untuk membela kepentingan yang memberikan kuasa atau perwakilan (*al-muwakkil*). Hal tersebut berlanjut sampai

²⁴Ferdiansyah, “peran dan Harapan Korban untuk Penyelesaian Pelanggaran Berat HAM Masa Lalu, Jurnal HAM Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2016. h. 16.

datangnya Islam. Cikal bakal advokat dalam Islam bisa ditelusuri melalui praktek *alwakâlah* yang sudah berkembang seiring dengan datangnya Islam.

Rasulullah saw pernah mewakilkan kepada sahabat untuk menyerahkan seekor unta yang menjadi kewajiban beliau kepada seseorang dimana orang tersebut datang menemui beliau memperkarakan untanya. Rasulullah saw memerintahkan para sahabat mencarikan unta yang seusia dengan unta yang dituntut orang tersebut untuk diberikan kepadanya. Namun para sahabat tidak mendapatkannya kecuali unta yang lebih tua. Kemudian Rasulullah saw. Memerintahkan menyerahkan unta yang lebih tua tersebut kepadanya dan orang itu berkata: “Engkau telah menunaikan kewajibanmu kepadaku maka Allah swt. Akan menunaikan pula kewajiban untukmu”. Demikian diantara praktek *al-wakâlah* di zaman Rasulullah saw. yang berdiri di atas prinsip tolong menolong sebagaimana diperintahkan oleh Islam. *Al-wakâlah* inilah yang menjadi cikal bakal profesi advokat.

Pada era Khulafâ’ al-Râsyidûn, praktek *al-wakâlah* semakin berkembang. Di masa inilah advokat mulai mengambil bentuknya. Dalam Ensiklopedi Hukum Islam disebutkan bahwa ‘Alî ibn Abû Thâlib pernah meminta ‘Uqayl mewakilnya sebagai pengacara dalam suatu perkara. Begitu pula yang dilakukan Abû Bakr, ‘Umar ibn al-Khathâb dan Usmân ibn ‘Affân. Hal ini menunjukkan bahwa perwakilan melalui seorang advokat dalam masalah-masalah yang disengketakan sudah diakui dan dipraktekkan di zaman Khulafâ’ al-Râsyidûn. Profesi advokat mulai benar-benar melembaga pada masa Dinasti Umayyah. Hal ini terlihat pada praktek beracara di hadapan pengadilan wilâyah al-mazhâlim saat itu yang selalu melibatkan atau menghadirkan para pembela dan pengacara (*alhumah dan al-a’wan*). Kehadiran para pengacara ini diharapkan dapat meredam kekerasan dan

keangkuhan hati para pejabat pemerintah yang diajukan ke persidangan atas pelanggaran yang dibuatnya terhadap anggota masyarakat.

Di masa Dinasti ‘Abbâsiyyah, seiring dengan pesatnya perkembangan fikih dan kajian hukum Islam yang ditandai dengan munculnya mazhab-mazhab hukum Islam, konsep perwakilan (*al-wakâlah*) khususnya dalam perkara sengketa perselisihan antar anggota masyarakat (*khushûmah*) baik perdata maupun pidana mulai disempurnakan dan dibakukan. Ulama-ulama masa ini sepakat menetapkan kebolehan menunjuk seorang pengacara dalam perkara-perkara yang dipersengketakan, baik oleh penggugat (*al-mudda’î*) terlebih lagi oleh pihak tergugat (*mudda’â ‘alayh*).

Di masa ini, lembaga tahkîm (badan arbitrase) mendapat legalisasi dari pemerintahan ‘Abbâsiyyah disamping lembaga-lembaga peradilan yang ada. Orang-orang yang berperkara dibenarkan menyerahkan perkaranya kepada seorang hakim yang mereka setuju atas dasar kerelaan kedua belah pihak yang berperkara. Lembaga advokat memasuki babak baru pada era akhir pemerintahan Dinasti Utsmâniyyah. Pada tahun 1846 M, untuk pertama kalinya didirikan sebuah universitas di Astanah yang membawahi sebuah akademi hukum yang nantinya melahirkan advokat. Akademi ini bernama Maktab al-Huqûq alShanî.

Pemerintah Utsmâniyyah mensyaratkan bahwa seorang advokat adalah yang dinyatakan lulus dan menyandang ijazah dari akademi tersebut, disamping harus menguasai bahasa resmi Daulah Utsmâniyyah yang sedikit berbeda dengan bahasa Turki. Pada tahun 1845 M penguasa Mesir menetapkan keputusan resmi yang mengatur tentang keberadaan seorang advokat di hadapan pengadilan bahwasanya pihak penggugat maupun tergugat tidak boleh diwakili oleh seorang pengacara kecuali keduanya atau salah satu dari keduanya tidak dapat hadir di persidangan karena alasan yang dapat diterima (*syar’î*). Pada tahun 1861 penguasa

Mesir mengadakan kesepakatan dengan para konsulat negara asing untuk membentuk lembaga peradilan yang memperkarakan orang-orang asing yang menetap di Mesir saat itu. Lembaga ini dinamai Majlis Qawmiyyun Mishr.

Di lembaga peradilan inilah peran advokat semakin jelas dengan dikeluarkannya aturan bahwa pihak tergugat dapat mengajukan wakilnya untuk beracara di hadapan pengadilan. Dalam ajaran Islam, sebelum suatu perkara diajukan ke proses peradilan maka para pihak yang bersengketa berkewajiban mencari ahli hukum untuk memberikan ijtihadnya. Dasar pijakannya adalah Hadis:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ اللَّهْصَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ رَجُلٍ يَحْفَظُ عِلْمًا فَيَكْتُمُهُ: إِلَّا أَتَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَلَجَمًا بِلَجَمٍ مِنَ النَّارِ (رواه ابن ماجه)

Artinya :

Dari Abu Huraira, dari Nabi saw, beliau bersabda, “tidaklah seseorang yang mempunyai ilmu kemudian menyembunyikannya, kecuali dia akan didatangkan pada hari kiamat dalam keadaan dicambuk dengan cambuk dari api neraka.”²⁵ (HR. Ibnu Majah).

Hadis ini menjelaskan bahwa seorang advokat tidak boleh menelantarkan kliennya dalam berurusan di pengadilan. Seorang advokat sangat dibutuhkan dalam memberikan jawaban-jawaban dan menyampaikan keinginan kliennya. Ruang lingkup pelayanan advokat terhadap para pihak pencari keadilan bukan hanya mewakili atau mendampingi di pengadilan (dalam proses litigasi) saja tetapi juga melaksanakan tugas-tugas pelayanan hukum di luar pengadilan (non litigasi). Esensi keberadaan seorang advokat adalah orang yang dipercaya masyarakat karena profesi mulianya sebagai penegak hukum yang penuh amanah dalam mendampingi klien. Seorang advokat dalam menangani suatu perkara tidak boleh membedakan klien yang datang mengadu kepadanya dan ia

²⁵Hadits No. 212. Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Sunan Ibnu Majah* (Riyahd: Al-Ma'arif, 1406 H/ 1986 M). Diterjemahkan oleh Tim Penertbit, *Shahih Sunan Ibnu Majah: Buku 1* (Jakarta: Pustaka Azzam: 1997), h. 135-136.

berkewajiban mendampingi dalam semua tahapan proses peradilan tanpa mengabaikan atau mengecewakan klien. Dalam Hadis disebutkan :

لَا دِينَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ (رواه الـ بـ يـ قـى)

Artinya :

Tidak ada agama bagi orang yang tidak amanah. (HR. Al-Bayhaqi)²⁶

Hadis ini memotivasi para advokat untuk selalu bersikap amanah dan tidak mengingkari janji. Sebagai contoh, jika ia berjanji akan mengadakan pertemuan di suatu tempat maka hendaklah ia datang agar kliennya tidak kecewa. Selain itu, nilai-nilai kode etik advokat ditinjau dari hukum Islam sejalan dengan sistem etika Islam. Prinsip-prinsip etika dalam Islam memberikan pandangan bahwa antara etika dan hukum merupakan satu kesatuan bangunan yang tidak dapat dipisahkan. Etika hukum Islam dibangun di atas empat nilai dasar yaitu tauhid, keadilan, kehendak bebas dan pertanggungjawaban. Adanya perilaku advokat yang melakukan praktek-praktek immoral disebabkan oleh lemahnya integritas personal advokat, baik integritas intelektual yang lemah secara hukum maupun integritas kepribadian, yaitu kejujuran, tanggung jawab, loyalitas dan keberpihakannya terhadap kebenaran.

2. Pelanggaran HAM menurut Hukum Islam.

Pandangan Islam terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia bahwa hak asasi telah ada sejak manusia dilahirkan hingga meninggal dunia. Hak kodrati merupakan anugerah Tuhan yang diberikan-Nya kepada semua umat manusia bersifat universal. Di satu sisi keuniversalan hak asasi ini menganut ajaran bahwa semua manusia diciptakan Allah dengan dilengkapi seperangkat kapasitas berupa potensi untuk melakukan sesuatuseuai dengan kehendaknya. Manusia sebagai

²⁶Abû Bakr Ahmad ibn Al-Husayn ibn ‘Alî al-Bayhâqî, Al-Sunan Al-Kubrâ, (Cet. I, Jilid II; India: Majlis Dâirah Al-Ma’ârif Al-Nizhâmiyyah, 1344 H), h. 239.

hamba Allah mempunyai beban tanggung jawab dalam mengembangkan tugas-tugas yang telah diamanahkan kepadanya selaku khalifah Allah di muka bumi.²⁷

Sebagai konsekuensi logis dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa manusia dihadapkan kepada dua tanggung jawab, yaitu tanggung jawab menjalankan amanah Allah selaku hamba-Nya dan sekaligus bertanggung jawab sebagai penentu kebijakan dan pengatur kehidupan. Bahkan Al-Qur'an dan Sunnah berfungsi sebagai transformasi dari kualitas kesadaran manusia mengarahkan manusia untuk dapat mewujudkan keshalehan individual dan kesalehan sosial sesuai dengan kesadaran dan kepatuhan kepada Allah. Pandangan seperti ini dalam istilah ilmu-ilmu sosial disebut paham theosentris.²⁸ Manusia dituntut untuk hidup dan bekerja keras dengan penuh kesadaran bahwa ia harus menunjukkan kepatuhannya kepada kehendak Allah dan mengakui hak-hak yang dimilikinya sebagai sebuah kewajiban dalam rangka kepatuhan kepada-Nya.²⁹

Penolakan terhadap HAM sama halnya dengan penafian terhadap nilai fitri yang merupakan anugerah sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an. Dalam konteks ini mengamalkan ajaran agama baik dalam bentuk aspek ibadah maupun aspek moral termasuk salah satu dari implementasi menjunjung tinggi nilai-nilai fitri sekaligus menegakkan HAM.

Dalam hal ini agama Islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai HAM dan rasa toleransi. Hal ini dibuktikan dengan adanya Piagam Madinah dari Rasulullah saw di antara kaum muslimin dan mukminin dari kaum Quraisy dan Yastrib dan orang yang mengikuti, menggabungkan dan berjuang bersama Rasulullah saw. Adapun sebagian kecil dari isi Piagam Madinah yang dapat dikutip yaitu:

²⁷Harun Nasution dan Bachtiar Effendi, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987) h. 171.

²⁸Eggi Sujana, *HAM dalam Pespektif Islam: Mencari Universalitas HAM bagi Tatanan Modernitas yang Hakiki*, (Jakarta: Nuansa Madani, 2002) h. 9.

²⁹Wahyu M. S., *Wawasan Ilmu Sosial Dasar*, (Surabaya: Penerbit Usaha Nasional, 1986) h. 106.

- a. Pasal 14 Piagam Madinah yang berbunyi:

وَلَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ مُّؤْمِنًا فِي كَافِرٍ وَلَا يُنْصَرُ كَافِرًا عَلَى مُؤْمِنٍ.

“Bahwa seorang mukmin tidak boleh membunuh orang beriman lainnya lantaran (membunuh) orang kafir. Tidak boleh pula orang mukmin membantu orang kafir untuk (membunuh) orang beriman”.³⁰

Hal ini sejalan dengan isi kovenan internasional terkait dengan hak-hak

sipil politik pada Pasal 6 ayat (1) bahwa:

“Setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekat pada dirinya. Hak ini wajib dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang”.³¹

- b. Pasal 16 Piagam Madinah menjelaskan:

وَإِنَّهُ مِنْ تَبَعِنَا مَنْ يَهُودٍ فَإِنَّ لَهُ النَّصْرَ وَالْأَسْوَةَ غَيْرَ مَظْلُومِينَ وَلَا مُتَنَاصِرٍ عَلَيْهِمْ.

“Bahwa sesungguhnya orang Yahudi yang mengikuti kita berhak atas pertolongan dan santunan, sepanjang (mukminin) tidak terzalimi dan ditentang (olehnya)”.³²

Dari beberapa kutipan isi dari Piagam Madinah tersebut jelas bahwa Islam sangat menjunjung nilai-nilai HAM dan rasa toleransi.

Adapun prinsip-prinsip umum yang terkandung dalam Piagam Madinah dengan mendekatinya dari sudut pandang yang ditemukan dalam Piagam Madinah bahwa Dalam Mukaddimah Piagam Madinah dan Pasal 22, 23, 42 dan akhir Pasal 47 mengandung kensep monoteisme. Mukaddimah Piagam Madinah diawali dengan kalimat *Bismillahi al Rahman al Rahim*, lalu maklumat bahwa piagam ini dari Muhammad saw yang hal ini mengandung nilai tauhid. Dalam Pasal 22 menyebutkan bahwa orang yang beriman kepada Allah swt dan hari akhir tidak dibenarkan membantu orang lain untuk membunuh, dan jika dia memberi bantuan akan mendapat kutukan dan kemurkaan Allah di hari kiamat. Dalam Pasal 23

³⁰Chalil Nafish, Piagam Madinah dan Deklarasi HAM Studi Historis dan Konseptual Atas Nilai Pluralisme Beragama (Cet.II; Jakarta: Mitra Abadi Press, 2015), h. 154.

³¹Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenan On Cipil and Political Right (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Dikutip dalam situs <http://advokasi.elsam.or.id> (Diakses pada Tanggal 30 November 2017).

³²Chalil Nafish, Piagam Madinah dan Deklarasi HAM Studi Historis dan Konseptual Atas Nilai Pluralisme Beragama, h. 155.

disebutkan bahwa penyelesaian perselisihan dikembalikan kepada Allah swt dan Muhammad saw. Dalam akhir Pasal 47 menjelaskan bahwa Allah swt dan Muhammad saw adalah penjamin orang-orang yang berbuat baik dan takwa. Meskipun tidak secara tegas tertulis kata tauhid,³³ namun secara implisit menunjukkan adanya prinsip-prinsip monoteisme.

Prinsip persatuan dan kesatuan sebagaimana termaktub dalam Pasal 1, 15, 17, 25. Dalam Pasal 1 menegaskan bahwa masyarakat Madinah adalah satu komunitas. Dalam Pasal 15 memuat bahwa jaminan Allah swt satu, yang sesama mukmin saling membantu. Dalam Pasal 17 menjelaskan kesatuan antar umat Islam dalam perdamaian. Dalam Pasal 25 menjelaskan bahwa seluruh penduduk Madinah, baik Yahudi maupun mukmin adalah satu rumpun. Perbedaan agama bukan penyebab membedakan anatar mereka. Dalam pasal-pasal tersebut jelas bahwa antara penduduk Madinah satu tanpa membedakan etnis atau agama.

Prinsip persamaan dan keadilan yang termaktub dalam Pasal 13, 15, 16, 22, 23, 24, 37, 40. Dalam Pasal 13 memuat keadilan dan persamaan dalam rangka membasmi kezaliman meskipun terhadap anaknya sendiri. Pasal 15 persamaan hak bagi semua orang mukmin. Pasal 16 persamaan hak bagi orang Yahudi yang mengikuti umat mukmin. Pasal 22 dan Pasal 23 menegaskan persamaan hak bagi umat mukmin dalam menjaga kesatuan dan semua urusan dikembalikan kepada Allah swt dan Muhammad saw. Pasal 24 menjelaskan persamaan dalam kewajiban antara mukmin dan Yahudi. Pasal 37 menegaskan kesamaan³⁴ kewajiban bagi kaum mukmin dan Yahudi untuk menjaga komitmen yang termaktub dalam shahifah. Pasal 40 menegaskan persamaan hak bagi yang telah mendapat jaminan.

³³Chalil Nafish, Piagam Madinah dan Deklarasi HAM Studi Historis dan Konseptual Atas Nilai Pluralisme Beragama, h. 66.

³⁴Chalil Nafish, Piagam Madinah dan Deklarasi HAM Studi Historis dan Konseptual Atas Nilai Pluralisme Beragama, h. 67.

Prinsip kebebasan beragama sebagaimana termaktub dalam Pasal 25 yang menegaskan bahwa antara Yahudi dan mukmin sebagai warga Negara Madinah tidak ada perbedaan. Mereka bebas memeluk agama yang mereka yakini, bebas memeluk agama dan bebas memilih keyakinan dan mereka mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Kecuali karena mereka zalim dan jahat.

Prinsip bela negara termuat dalam Pasal 24, 37, 38 dan 44. Dalam Pasal 24 kewajiban mengeluarkan biaya perang dalam rangka bela negara. Dalam Pasal 37 dan 38 menegaskan kewajiban warga masyarakat Madinah, baik Yahudi maupun muslim untuk mengeluarkan biaya dan membela konstitusi. Pasal 40 jaminan bagi warga yang tidak melakukan pengkhianatan. Semua ini secara tersurat dan tersirat menegaskan arti bela negara.³⁵



³⁵Chalil Nafish, Piagam Madinah dan Deklarasi HAM Studi Historis dan Konseptual Atas Nilai Pluralisme Beragama, h. 68.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian merupakan suatu cara atau jalan untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap segala permasalahan. Di dalam penelitian dikenal adanya beberapa macam teori untuk menerapkan salah satu metode yang relevan terhadap permasalahan tertentu, mengingat bahwa tidak setiap permasalahan yang dikaitkan dengan kemampuan si peneliti, biaya dan lokasi dapat diselesaikan dengan bentuk apapun metode penelitian.¹

Agar suatu penelitian dapat bersifat obyektif maka dalam mengambil kesimpulan harus berpedoman pada metode penelitian. Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis penelitian.

Dalam penelitian hukum dikenal dua jenis penelitian yaitu penelitian normatif (doktrinal) dan penelitian empiris. Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah gabungan antara penelitian normatif (doktrinal) dan penelitian empiris. Penelitian normatif digunakan untuk melihat ketentuan-ketentuan mengenai peranan lembaga bantuan hukum dalam menangani kasus pelanggaran HAM. Sedangkan penelitian empiris digunakan untuk mengetahui pelaksanaan peranan lembaga bantuan hukum dalam menangani kasus pelanggaran HAM, serta kendala-kendala yang dialami dalam melakukan penanganan kasus pelanggaran HAM.

¹Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Cet. 4; Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 2.

2. Lokasi penelitian.

Lokasi penelitian difokuskan pada peranan Lembaga Bantuan Hukum Makassar untuk mengetahui:

- a. Upaya penanganan yang telah dilakukan LBH Makassar terhadap pelanggaran HAM yang terjadi di Kota Makassar, serta
- b. Pandangan Hukum Islam terhadap penanganan pelanggaran HAM.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian, peneliti menggunakan pendekatan sebagai berikut:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), adalah pendekatan yang digunakan untuk menemukan preskripsi baru yang sesuai dengan tingkat perkembangan masyarakat.²
2. Pendekatan Teologis Normatif (Syar'i) adalah pendekatan dengan melakukan upaya memahami agama dengan menggunakan kerangka ilmu ketuhanan, yang bertolak dari suatu keyakinan bahwa wujud empirik dari suatu keagamaan dianggap yang paling benar bila dibandingkan dengan elemen lainnya.³

C. Sumber Data

Untuk memperoleh data yang terkait dalam membangun penelitian, maka dibutuhkan sumber data yaitu :

1. Data primer, adalah data yang dihimpun secara langsung melalui wawancara dengan beberapa informan dan diolah sendiri oleh lembaga bersangkutan

²Abu Yasid, *Aspek-Aspek Penelitian Hukum Islam - Hukum Barat* (Cet. I ; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) h. 86.

³Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 28.

untuk dimanfaatkan. Data primer dapat berbentuk opini subjek secara individu atau kelompok, dan hasil observasi terhadap karakteristik benda (fisik), kejadian, kegiatan dan hasil suatu pengujian tertentu.

2. Data sekunder, adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (dihasilkan pihak lain) atau digunakan oleh lembaga lainnya yang bukan merupakan pengolahnya, tetapi dapat dimanfaatkan dalam suatu penelitian tertentu.⁴

Dan untuk menguatkan data sekunder maka digolongkan yaitu sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari:
 - 1) Al-Qur'an
 - 2) Norma atau kaedah dasar yaitu Undang-Undang Dasar 1945
 - 3) Undang-Undang, yaitu : Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Undang-Undang No. 18 Tahun 2003,
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, dan sebagainya.
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus hukum, ensiklopedia, indeks, kumulatif, dan sebagainya.⁵

⁴Rosady Ruslan, *Metode Penelitian: Public Relations & Komunikasi* (Edi. 1, Cet. 5; Jakarta: Rajawali Pers, 2010). h. 138.

⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Cet. 3; Jakarta: Universitas Indonesia (UII) Press, 1986). h. 52.

D. Metode Pengumpulan Data

Dalam melakukan sebuah penelitian lapangan (*Field Research*) dibutuhkan suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena hukum dan persoalan kehidupan manusia.

Untuk menjelaskan tentang metode yang digunakan dalam penelitian lapangan, maka digunakan dua metode dalam penelitian yaitu:

1. Studi kepustakaan, yaitu bahan bacaan mengenai penelitian-penelitian yang pernah dilakukan pada masa lampau.⁶
2. Wawancara (*Interview*), yaitu salah satu bentuk komunikasi antara dua orang atau lebih dan melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu,
3. Dokumentasi, yaitu sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar berbentuk surat, laporan, foto, dan lain-lain.

E. Instrumen Penelitian

Alat ukur dalam penelitian dinamakan instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah suatu alat yang mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Peneliti sendiri sebagai instrument dalam penelitian kualitatif. Adapun alat-alat penelitian yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, h. 201.

1. Pedoman wawancara adalah alat yang digunakan dalam melakukan wawancara yang dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dari informan yang berupa daftar pertanyaan.
2. Buku catatan dan alat tulis berfungsi untuk mencatat semua percakapan dengan sumber data yang dianggap penting.
3. Kamera Handphone berfungsi untuk memotret jika peneliti sedang melakukan pembicaraan dengan informan, dengan adanya foto dan rekaman ini maka dapat meningkatkan keabsahan akan lebih terjamin.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik pengolahan

Proses pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu membandingkan data primer dan data sekunder lalu diklasifikasikan kemudian dijabarkan dan disusun secara sistematis, sehingga diperoleh suatu pengetahuan.

Adapun langkah-langkah dalam mengolah data adalah sebagai berikut: Pertama, Identifikasi data, yaitu melakukan proses klasifikasi terhadap data yang langsung diperoleh dari lapangan berupa data primer dan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan berupa data sekunder. Setelah semua data yang sudah terkumpul masih berupa bahan mentah, maka pengolahan data selanjutnya dilakukan dengan metode editing, yaitu memeriksa atau membetulkan data serta menempatkan data tersebut ke dalam kerangka pembahasan yang telah dipersiapkan berdasarkan rumusan masalah agar dapat dipertanggungjawabkan. Kedua, Verifikasi data atau penarikan kesimpulan adalah langkah terakhir dari pengolahan data. Penarikan kesimpulan harus berdasarkan pada identifikasi data dan editing data.

2. Analisis data

Data yang diperoleh dan yang telah diolah, penyajian data dilakukan dengan menganalisisnya secara deskriptif kualitatif.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar

1. Sejarah Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar

LBH Makassar (awalnya LBH Ujung Pandang) didirikan pada tanggal 23 September 1983 oleh para Pengacara dan Advokat PERADIN (Persatuan Advokat Indonesia) dan kemudian bergabung dengan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) yang berkantor pusat di Jl. Diponegoro No. 74 Jakarta Pusat. Ide pembentukan LBH Makassar ketika itu dikerjakan sebuah tim yang terdiri atas beberapa advokat senior seperti M.Ilyas Amin SH, Harry Tio, SH., H..M. Arsyad Ohoitenan SH, Fachruddin Solo SH serta Sakurayati Trisna SH.

Pemberian nama “LBH Makassar” merupakan satu kesatuan, dimana pencantuman nama ibukota propinsi (“Makassar”) adalah suatu identitas dari kantor LBH yang merupakan cabang dari YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia) yang saat ini telah memiliki 15 (lima belas) kantor cabang yang berkedudukan di beberapa ibukota provinsi dan diberi nama sesuai dengan ibukota propinsi. Kepemimpinan LBH Makassar dimulai dari M. Ilyas Amin SH sebagai Direktur Pertama untuk periode 1983-1986. A.Rudiyanto Asapa selama dua periode, yakni periode 1986-1989 dan periode 1989-1992. Direktur ketiga adalah Nasiruddin Pasigai SH untuk periode 1993-1996, Mappinawang SH, 1997-2003 dan M. Hasbi Abdullah, SH. Periode 2004 – 2007, Abdul Muttalib, SH 2007-2011, Abdul Azis, SH 2011-2015, dan Haswandy Andy Mas, SH 2016-sekarang.

Sebagai kantor cabang Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), LBH Makassar memiliki visi dan misi yang sama dengan YLBHI

sebagai sebuah organisasi masyarakat sipil memandang bahwa penyelenggaraan negara harus melindungi dan menjamin rakyat dalam memenuhi hak-hak ekonomi, social dan budaya serta kebebasan-kebebasan dasar manusia. Untuk itu, negara perlu merumuskan dan menetapkan aturan hukum yang adil dan berpihak kepada masyarakat. Institusi-institusi negara juga berkewajiban untuk melindungi dan menegakkan kebebasan-kebebasan dan hak-hak asasi manusia di tengah tekanan liberalisasi ekonomi dan globalisasi. Liberalisasi ekonomi dan globalisasi berdampak pada perubahan tatanan dan perilaku masyarakat ditingkat local. Arus modal yang didominasi oleh perusahaan besar (MNCs/TNCs) telah menembus batas-batas wilayah negara. Dalam fase berikutnya, agenda liberalisasi ekonomi dan globalisasi akan menyeret dan terjebaknya negara dalam peran-peran sebagai fasilitator kepentingan modal.

Kebijakan negara tidak seuruhnya ditentukan oleh negara, melainkan juga hasil dari penetrasi dan aturan-aturan internasional seperti WTO dan kebijakan lembaga keuangan internasional (World Bank group dan IMF). Skenario global tersebut merepresi masyarakat ditingkat akar rumput.

Membanjirnya produk komoditi pertanian dari dunia internasional yang mematikan petani, perputaran buruh murah dan berpenghasilan rendah merupakan dampak dari agenda ini. Agenda perdagangan internasional mencakup seluruh aspek perdagangan komoditi dan jasa. Operasionalisasi dari skenario global akan melibatkan aktor-aktor ditingkat domestik terutama institusi-institusi negara yang berkolaborasi dengan pemilik modal.

Masalah arus modal di atas, parallel beriringan dengan problem-problem khas masyarakat di era transisi yakni dengan terbelahnya masyarakat berdasarkan agama, ras, etnis, identitas dan gender. Konflik horizontal yang merebak dan meluas saat ini dapat dibaca sebagai produk dari pergesekan kepentingan faksi

modal domestik versus faksi modal internasional yang memperebutkan sumber-sumber ekonomi local. Solusi dari konflik horizontal mesti menjawab akar masalah yang muncul : ketidakadilan ekonomi, social, politik, budaya, hukum, dan gender.

Proses transisi sekarang mesti dapat meletakkan dasar pijakan sekaligus melaksanakan kewajiban memproteksi rakyat. Proses ini tidak mungkin terlaksana tanpa partisipasi masyarakat. LBH Makassar memandang kekuatan-kekuatan masyarakat mesti diposisikan sebagai subjek perubahan. Petani, nelayan, buruh dan kaum miskin kota menjadi kelompok-kelompok masyarakat yang mesti dibela. Kelompok inilah yang paling dirugikan akibat liberalisasi ekonomi dan globalisasi. Penguatan negara hanya dalam lingkup perlindungan bagi rakyat dari ancaman scenario global.¹

2. Visi Misi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar

a. Visi LBH Makassar

Visi LBH Makassar adalah :

“Menentukan arah transisi politik dan transformasi politik yang berkeadilan gender dengan berbasiskan gerakan rakyat”

b. Misi LBH Makassar

Terwujudnya masyarakat yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan social merupakan cita-cita seluruh rakyat Indonesia. Prinsip-prinsip keadilan social ini ditandai dengan adanya penyelenggaraan negara yang mengimplementasikan kesejahteraan rakyat dan tumbuh serta berkembangnya kekuatan-kekuatan masyarakat yang mampu mengontrol penyelenggaraan negara.

Proses untuk menuju tatanan masyarakat tersebut akan membawa konsekuensi-konsekuensi logis berupa perubahan ditingkat tatanan masyarakat.

¹Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar, *Sejarah Lembaga Bantuan Hukum Makassar*. Dikutif dalam situs <http://lbhmakassar.org/sejarah/>. Diakses pada tanggal 12 Juli 2017.

Era transisi telah membawa beberapa perubahan atau koreksi struktur dan system yang dibangun Orde Baru. Telah terjadi proses devolusi kekuasaan dari sentralistik ke desentralisasi kekuasaan di tingkat local yang diistilahkan dengan Otonomi daerah.

Menguatnya wacana *good goverance*, demokratisasi, hak asasi manusia, dan lingkungan hidup merupakan fenomena perubahan. Persoalannya kemudian, perubahan-perubahan ini bukan serta merta merupakan hasil dari tuntutan masyarakat, melainkan mesti dikritisi sebagai alat moderasi dari kepentingan modal internasional untuk melemahkan resistensi rakyat.

LBH Makassar mesti dapat mencermati dan mengkritisi agenda-agenda pasar internasional dan agenda Negara dominan. Peran LBH Makassar mesti diarahkan pada upaya-upaya mendorong terwujudnya negara hukum yang menjamin keadilan sosial. Hukum-hukum yang ditetapkan bukanlah hasil kompromi institusi-institusi negara dengan kekuatan pasar, tetapi hukum-hukum yang dirumuskan atas dasar tuntutan dan aspirasi masyarakat. Disinilah agenda utama dari kerja Bantuan.

Di atas masyarakat, LBH Makassar memiliki misi :

- 1) Pertama, mendorong transformasi politik yang berlandaskan gerakan rakyat dan berkeadilan gender. Transformasi politik ini ditujukan bagi pembukaan peluang untuk mengoreksi relasi-relasi kekuasaan yang menindas seperti sekarang, di mana mayoritas masyarakat Indonesia yakni petani, nelayan, buruh menjadi subordinasi kelompok penguasa. Penguasa yang dimaksud disini dapat bernaung dalam birokrasi, partai politik, dan institusi negara lainnya.
- 2) Kedua, mempromosikan dan memperjuangkan terjaminnya hak-hak ekonomi, social dan budaya. Terjaminnya hak-hak ini merupakan jawaban

bagi gerak modal MNCs/TNCs dan ancaman lembaga keuangan internasional. Hanya dengan sumber-sumber ekonomi ditangan masyarakat akan tercipta kesejahteraan yang sebenarnya. Jika tidak, maka masyarakat kita hanya menjadi konsumen dan penyedia tenaga kerja yang murah serta penerima sampah dan limbah proses produksi.

- 3) Ketiga, Hal ini mutlak dilakukan untuk mendukung upaya mempromosikan dan memperjuangkan hak-hak di atas. Kebebasan-kebebasan dasar dalam konsepsi hak-hak sipil dan politik merupakan bekal awal bagi terbukanya peluang masyarakat untuk memenuhi hak-hak ekonomi, social dan budayanya.²

3. Posisi dan Peran Strategis Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar

Peran strategis LBH Makassar dapat dirumuskan menjadi tiga peran utama:

Memberikan bantuan hukum kepada masyarakat marginal tanpa membedakan latar belakang suku agama dan ras yang bertumpu pada nilai-nilai hukum dan martabat serta hak asasi manusia.

Meningkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat baik pada pejabat Negara maupun masyarakat biasa guna tumbuhnya kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai subyek hukum dan berperan serta aktif dalam penegakan, pembentukan dan pembaruan hukum.

Mempengaruhi kebijakan publik yang menentukan terjaminnya hak-hak ekonomi, social, budaya dan hak-hak sipil dan politik. Prasyarat yang mutlak adalah meningkatkan kemampuan dan kepedulian kontrol social bagi kekuatan-kekuatan organisasi masyarakat sipil untuk mendorong lahirnya kebijakan publik

²Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar, *Visi Misi Lembaga Bantuan Hukum Makassar*. Dikutif dalam situs <http://lbhmakassar.org/visi-dan-misi/>. Diakses pada tanggal 12 Juli 2017.

yang berpihak kepada hak ekonomi, sosial, budaya dan hak sipil politik, baik ditingkat nasional maupun ditingkat internasional.

Memainkan peran bersama-sama masyarakat sipil dalam menentukan arah transisi politik dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia dan keadilan gender. Menentukan arah transisi politik berarti memprakarsai dan memanfaatkan ruang publik atas dasar kepentingan masyarakat sipil.

Memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya gerakan rakyat. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan posisi tawar dalam sistem politik makro. Peran strategis utama tersebut kemudian harus diterjemahkan dan dapat diimplementasikan dalam program kegiatan secara sinergis di dalam divisidivisi maupun bidang-bidang kerja.

4. Ruang Lingkup Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar

Adapun ruang lingkup kerja LBH Makassar adalah :

a. Konsultasi Hukum

Diberikan kepada setiap kelompok masyarakat yang membutuhkan nasehat atau advis hukum untuk semua jenis perkara/ kasus.

1) Pendampingan kasus

Dilakukan terhadap kasus yang memenuhi klasifikasi sebagai berikut :

- a) Konflik tidak hanya menyangkut pada kepentingan individual, tetapi juga kepentingan kelompok masyarakat.
- b) Memiliki prospek bagi pengembangan dan pembaharuan hukum yang lebih memihak kepada masyarakat.

Adapun jenis dari kasus yang didampingi oleh LBH Makassar adalah sebagai berikut :

- a) Kasus pertanahan. Berkaitan dengan pemerataan sumberdaya ekonomi, terutama masyarakat yang sebagian besar masih tergantung pada sektor pertanian.
- b) Kasus lingkungan hidup. Berkaitan dengan hak atas lingkungan hidup yang sehat dan baik (*right to decent environment*).
- c) Kasus perburuhan. Berkaitan dengan akses sebagian besar kelompok masyarakat (buruh) yang tidak berdaya terhadap sumber daya ekonomi.
- d) Kasus hak sipil dan politik. Berkaitan dengan peningkatan posisi dan akses masyarakat (*society*) dalam hubungannya dengan negara (*state*).
- e) Kasus anak dan perempuan. Berkaitan dengan eksploitasi, tindak kekerasan, diskriminasi terhadap anak dan perempuan.

b. Pendidikan & Pengorganisasian

Pendidikan & Pengorganisasian merupakan bagian kerja advokasi LBH Makassar yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas hukum dan posisi tawar masyarakat dalam mendorong kebijakan yang berkeadilan maupun dalam menghadapi berbagai permasalahan hukum yang mereka hadapi.

c. Publikasi & Kampanye.

Selain aktif melakukan kegiatan publikasi dan kampanye, LBH Makassar juga melakukan riset menyangkut topik yang menjadi bidang prioritas kerja LBH Makassar seperti perlindungan terhadap hak sipil dan politik, perlindungan terhadap hak-hak buruh, petani, anak dan perempuan serta kelompok miskin kota dan pemberantasan korupsi.³

³Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar, *Ruang Lingkup Kerja Lembaga Bantuan Hukum Makassar*. Dikutif dalam situs <http://lbhmakassar.org/ruang-lingkup-kerja/>. Diakses pada tanggal 12 Juli 2017.

5. Wilayah dan Jaringan Kerja Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar

Prioritas wilayah kerja LBH Makassar adalah wilayah Propinsi Sulawesi Selatan meliputi : Kota Makassar, Kabupaten Maros, Kabupaten Gowa, Kabupaten Takalar, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Bone, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Sidrap, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Wajo, Kabupaten Tanah Toraja, Kabupaten Luwu. Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Selayar, Kabupaten Pangkep, Kabupaten Barru dan Kota. Pare-Pare, Kabupaten Pangkep, dan Kota Palopo.

LBH Makassar yang dahulu bernama LBH Ujung Pandang sejak berdiri hingga dalam perkembangannya telah beberapa kali melaksanakan dan terlibat dalam berbagai kegiatan atau program yang berkaitan dengan bantuan hukum dan advokasi serta melakukan studi kebijakan yang berhubungan dengan masyarakat. Sebagai garda terdepan dalam memberikan layanan bantuan hukum struktural, LBH Makassar menangani tidak kurang dari 150 kasus/perkara setiap tahunnya. Strategi dan out put dari kegiatan dan program LBH Makassar selalu mengacu pada terciptanya pemberdayaan masyarakat terutama dalam meningkatkan kesadaran hukum dan posisi tawar masyarakat. Untuk itu LBH Makassar telah pula melakukan pelbagai kegiatan berupa Training, Workshop, Seminar sebagai upaya penguatan kapasitas Hukum & Politik masyarakat sipil (Marginal) dan Promosi penegakan Hukum dan HAM.

Dalam menjalankan aktifitasnya, LBH Makassar memperoleh dari Subsidi YLBHI, Kerjasama dengan organisasi yang memiliki perhatian dalam Issu Hukum,

HAM, Good & Clean Governance, Fundraising, sumbangan berbagai pihak yang sifatnya tidak mengikat.⁴

6. Standar Pelayanan Minimum Lembaga Bantuan Hukum Makassar

b. Maksud dan Tujuan

1) Maksud Bantuan Hukum

- a) Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
- b) Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
- c) Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini.
- d) Penyelenggara Bantuan Hukum adalah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

2) Tujuan Bantuan Hukum

- a) Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b) Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c) Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia;

⁴Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar, *Wilayah dan Jaringan Kerja Lembaga Bantuan Hukum Makassar*. Dikutif dalam situs <http://lbhmakassar.org/wilayah-dan-jaringan-kerja/>. Diakses pada tanggal 12 Juli 2017.

- d) Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

c. Hak dan kewajiban Penerima Bantuan Hukum

1) Penerima Bantuan Hukum

Orang miskin atau kelompok orang miskin, yaitu yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri seperti: hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, atau perumahan.

2) Hak Penerima Bantuan Hukum

Penerima Bantuan Hukum berhak:

- a) Mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
- b) Mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat; dan
- c) Mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Kewajiban Penerima Bantuan Hukum

Penerima Bantuan Hukum wajib:

- a) Menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum;
- b) Membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.
- c) Mengelola anggaran Bantuan Hukum secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel; dan

- d) Menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada setiap akhir tahun anggaran.

d. Jenis Layanan Bantuan Hukum

1) Pemberian Bantuan Hukum meliputi :

- a) Litigasi
- b) Non litigasi

2) Pemberian Bantuan Hukum Litigasi: dilakukan oleh advokat yang berstatus sebagai advokat publik dan staff advokat LBH Makassar. Meliputi masalah hukum:

- a) Keperdataan;
- b) Masalah hukum pidana
- c) Masalah hukum tata usaha negara

c) Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi meliputi kegiatan:

- a) Penyuluhan hukum;
- b) Konsultasi hukum;
- c) Investigasi perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik;
- d) Penelitian hukum;
- e) Mediasi;
- f) Negosiasi;
- g) Pemberdayaan masyarakat;
- h) Pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
- i) Drafting dokumen hukum.

d. Syarat-syarat permohonan bantuan hukum

- 1) Mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
- 2) Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
- 3) Melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum.

e. Tata Cara Permohonan

- 1) Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum secara tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- 2) Permohonan paling sedikit memuat:
 - a) Identitas Pemohon Bantuan Hukum; dan
 - b) Uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum.
 - c) Permohonan Bantuan Hukum harus dilampiri Surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum; dan Dokumen yang berkenaan dengan perkara.
- 3) Jika pemohon Bantuan Hukum yang tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis dapat mengajukan permohonan secara lisan.
- 4) Dalam hal Permohonan Bantuan Hukum diajukan secara lisan, Pemberi Bantuan Hukum menuangkan dalam bentuk tertulis.
- 5) Permohonan tersebut ditandatangani atau dicap jempol oleh Pemohon Bantuan Hukum.

6) Identitas Pemohon :

- a) Identitas Pemohon Bantuan Hukum dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
- b) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki identitas, Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain dari instansi yang berwenang sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum.

7) Surat Keterangan Miskin :

- a) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan miskin, Pemohon Bantuan Hukum dapat melampirkan Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat, Bantuan Langsung Tunai, Kartu Beras Miskin, atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin.
- b) Jika sama sekali tidak memiliki, Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh persyaratan tersebut.
- c) Lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum wajib mengeluarkan surat keterangan miskin dan/atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin untuk keperluan penerimaan Bantuan Hukum.

8) Batas Waktu Permohonan :

- a) Pemberi Bantuan Hukum wajib memeriksa kelengkapan persyaratan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima berkas permohonan Bantuan Hukum.
- b) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis atas permohonan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap.
- c) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan kesediaan, Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.

B. Upaya Penanganan oleh LBH Makassar Terhadap Pelanggaran HAM yang Terjadi di Kota Makassar

Konsepsi Hak Asasi Manusia (HAM) tidaklah dapat dipisahkan dari konsepsi Negara Hukum. Negara hukum dimaknai sebagai Negara yang berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*Machsstaat*) berdiri sebagai kesatuan tatanan norma berlandaskan pada konstitusi yang tidak absolutisme. Konstitusi itu sendiri berisi nilai-nilai Hak Asasi Manusia yang menjadi pedoman hidup bernegara dan berbangsa. Hal ini menguatkan keberadaan Negara hukum menghendaki adanya supremasi HAM. Indonesia sebagai Negara hukum mengakui dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan kebebasan dasar manusia. Dalam Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menegaskan bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara,

hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Bahkan jauh sebelumnya, pasca kemerdekaan, para *founding fathers* Indonesia telah mencantumkan prinsip-prinsip HAM dalam konstitusi Republik Indonesia, yakni pada Undang-Undang Dasar 1945 dan pembukaanya, sebagai pedoman dan cita-cita yang harus dilaksanakan dan dicapai.

Hal yang perlu disadari, konsepsi tersebut ternyata masih belum sejalan dengan kondisi penegakan hukum dan HAM di Indonesia. Nilai-nilai keadilan dan kebenaran masih sangat jauh dan tak jarang tidak berpihak kepada masyarakat. Sejumlah pelanggaran HAM, sistem peradilan yang tidak independen dan imparial, masih kuatnya intervensi kekuasaan Negara dan Pemerintah terhadap implementasi hukum dan HAM, lemahnya perlindungan hukum dan HAM terhadap masyarakat marginal/ miskin, hingga saat ini menjadi warna buruk kehidupan bangsa Indonesia.

LBH Makassar, atas kasus yang diadukan, melakukan pendampingan dalam 3 (tiga) bentuk pendampingan (layanan), yakni konsultasi, non-litigasi dan pendampingan secara litigasi. Pembagian bentuk pendampingan ini menyesuaikan pada kebutuhan para pemohon (penerima manfaat). Walaupun demikian, dapat dipahami bahwa ketiga bentuk tersebut selalu bersinggungan, dimana pendampingan konsultasi dan non-litigasi dapat ditingkatkan ke tahap litigasi dan demikian sebaliknya, pendampingan secara litigasi, yakni melalui jalur lembaga peradilan (kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan), dari awal dan dalam prosesnya selalu melalui tahapan konsultasi dan non-litigasi (negosiasi, mediasi, pengorganisasian, penyuluhan atau pendampingan hukum, dan lain sebagainya). Kondisi ini sudah menjadi metode kerja dan upaya standar minimum bantuan hukum LBH Makassar.

Oleh Karena itu, pendataan berbasis bentuk layanan bantuan hukum oleh LBH Makassar hanya difokuskan pada tahapan akhir pendampingan setiap kasus.

Adapun hasil wawancara oleh Suharno, mengemukakan bahwa:

“Bentuk pelanggaran HAM yang terjadi di kota Makassar ada dua bentuk yaitu pelanggaran terhadap Hak SIPOL (Sipil dan Politik) dan Hak EKOSOB (Ekonomi, Sosial dan Budaya). Sebagai contoh terhadap pelanggaran Hak SIPOL misalkan penangkapan secara sewenang-wenang, pelanggaran terhadap hak kebebasan berekspresi, pelanggaran terhadap hak atas kedudukan yang sama di muka hukum dan masih banyak lagi kasus pelanggaran terhadap Hak SIPOL yang terjadi di kota Makassar.

Dan kasus pelanggaran terhadap Hak EKOSOB yang terjadi di kota Makassar misalkan pelanggaran terhadap hak atas lingkungan hidup, pelanggaran terhadap hak untuk berserikat dan pelanggaran terhadap hak atas pendidikan, dan tidak dapat dipungkiri masih banyak lagi pelanggaran terhadap Hak EKOSOB yang terjadi di kota Makassar”.⁵

Kemudian ditambahkan oleh Abdul Azis Dumpa dengan memberikan penjelasan terkait kasus pelanggaran HAM yang terjadi di kota Makassar, terbagi dua yaitu

“Dari segi Ekosob seperti terjadinya kasus perampasan lahan, sengketa tanah, represifitas aparat dan masih banyak lagi. Kemudian dari segi sipol, misalkan banyak yang ditangkap tanpa adanya surat penganan dan mendapatkan perilaku penyiksaan dari aparat kepolisian”.⁶

Dalam menangani kasus pelanggaran HAM di Kota Makassar, Suharno memberikan keterangan, bahwa langkah pertama yang harus dilakukan oleh LBH Makassar yaitu:

1. Melakukan investigasi untuk mengumpulkan informasi terkait pelanggaran HAM baik berupa jenis pelanggaran HAM berat ataupun ringan dan untuk mengetahui apakah itu merupakan kasus pelanggaran HAM atau bukan, karena yang dikatakan dengan pelanggaran HAM ialah ada campur tangan oleh negara, misalnya kasus penangkapan terhadap warga sipil tanpa adanya surat penanganan yang diberikan dan masih banyak lagi yang dapat dijadikan contoh pelanggaran HAM yang terjadi.

⁵Suharno, Wakil Direktur Bidang Riset LBH Makassar, *Wawancara*, Makassar, 10 Juli 2017.

⁶Abdul Aziz Dumpa, Koordinator Hak Sipil LBH Makassar, *Wawancara*, Makassar, 10 Juli 2017.

2. Membangun aliansi masyarakat dan mahasiswa yang berpengaruh dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM.
3. Dengan melakukan kampanye di media massa berupa petisi-petisi yang berisikan perlawanan terhadap kasus pelanggaran HAM yang terjadi.⁷
4. melakukan pelaporan terkait pelanggaran HAM di KOMNAS HAM.⁷

Selanjutnya ditambahkan, oleh Abdul Azis Dumpa yang memberikan keterangan yaitu:

Menganalisanya terlebih dahulu, apakah kasus tersebut termasuk pelanggaran HAM atau bukan, karena yang memenuhi pelanggaran HAM adalah adanya campur tangan dari negara dan ketika negara beserta aparatnya menindas itu adalah pelanggaran HAM.⁸

Mengenai dampak yang dirasakan oleh masyarakat ketika Lembaga Bantuan Hukum Makassar melakukan penanganan terhadap pelanggaran HAM yang terjadi, Suharno memberikan keterangan, yaitu

Bahwa dengan adanya penanganan kasus pelanggaran HAM ini maka masyarakat dapat lebih berani menyampaikan terkait pelanggaran HAM yang mereka alami, dan masyarakat lebih berharap kepada LBH Makassar agar dapat menyelesaikan kasus pelanggaran HAM dengan baik sehingga mereka dapat merasakan keadilan.⁹

Selanjutnya ditambahkan oleh Abdul Azis Dumpa yaitu

Bahwa dampak yang dirasakan oleh masyarakat ketika lembaga bantuan hukum melakukan penanganan terhadap kasus pelanggaran HAM ialah masyarakat dapat merasakan terpenuhinya keadilan bagi mereka dan mengetahui bahwa mereka mempunyai kesadaran hukum dan kasusnya dapat terselesaikan dengan baik.¹⁰

Terkait dengan bentuk-bentuk pelanggaran HAM yang terjadi di kota Makassar, Suharno memberikan keterangan, yaitu

Bahwa Pelanggaran yang terjadi di kota Makassar ada dua bentuk yaitu pelanggaran terhadap Hak Sipil (Sipil dan Politik) dan Hak Ekosob (Ekonomi, Sosial dan Budaya). Sebagai contoh terhadap pelanggaran Hak

⁷Suharno, Wakil Direktur Bidang Riset LBH Makassar, *Wawancara*, Makassar, 10 Juli 2017.

⁸Abdul Aziz Dumpa, Koordinator Hak Sipil LBH Makassar, *Wawancara*, Makassar, 10 Juli 2017.

⁹Suharno, Wakil Direktur Bidang Riset LBH Makassar, *Wawancara*, Makassar, 10 Juli 2017.

¹⁰Abdul Aziz Dumpa, Koordinator Hak Sipil LBH Makassar, *Wawancara*, Makassar, 10 Juli 2017.

Sipol misalkan penangkapan secara sewenang-wenang, pelanggaran terhadap hak kebebasan berekspresi, pelanggaran terhadap hak atas kedudukan yang sama di muka hukum dan masih banyak lagi kasus pelanggaran terhadap Hak Sipol yang terjadi di kota Makassar. Dan kasus pelanggaran terhadap Hak Ekosob yang terjadi di kota Makassar misalkan pelanggaran terhadap hak atas lingkungan hidup, pelanggaran terhadap hak untuk berserikat dan pelanggaran terhadap hak atas pendidikan, dan tidak dapat dipungkiri masih banyak lagi pelanggaran terhadap Hak Ekosob yang terjadi di kota Makassar.¹¹

Kemudian Abdul Azis Dumpa menambahkan terkait dengan bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi di Kota Makassar, yaitu

Bahwa kasus pelanggaran HAM yang terjadi di kota makassar, itu terbagi dua, dari segi Ekosob seperti terjadinya kasus perampasan lahan, sengketa tanah, represifitas aparat dan masih banyak lagi. Kemudian dari segi Hak Sipol, misalkan banyak yang ditangkap tanpa adanya surat penganan dan mendapatkan perilaku penyiksaan dari aparat kepolisian.¹²

Berkaitan dengan peran Lembaga Bantuan Hukum Makassar dalam menangani kasus pelanggaran HAM, Suharno memberikan keterangan, yaitu

Bahwa penanganan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar terhadap kasus pelanggaran HAM adalah dengan melakukan advokasi, baik advokasi secara litigasi maupun non litigasi. Dalam advokasi litigasi kami mendampingi masyarakat yang bermasalah terhadap kasus pelanggaran hak asasi manusia di dalam persidangan dan berusaha memenangkan kasus yang menjeratnya sehingga mereka dapat merasakan keadilan. Kemudian dalam advokasi non litigasi, kami melakukan kampanye atas pelanggaran HAM, membangun aliansi masyarakat dan mahasiswa yang menentang kasus pelanggaran HAM yang terjadi dan melakukan pendidikan hukum kepada masyarakat untuk meningkatkan wawasan mereka terhadap hukum.¹³

Kemudian Abdul Azis Dumpa menambahkan, yaitu

Bahwa peran Lembaga Bantuan Hukum Makassar dalam menangani kasus pelanggaran HAM itu dapat dilihat dari segi litigasi dan non litigasi, dari segi litigasi kami melakukan pendampingan terhadap masyarakat dalam menangani kasus yang menjeratnya kemudian dari segi non litigasi kami melakukan kampanye ke media massa, mendirikan aliansi masyarakat dan

¹¹Suharno, Wakil Direktur Bidang Riset LBH Makassar, *Wawancara*, Makassar, 10 Juli 2017.

¹²Abdul Aziz Dumpa, Koordinator Hak Sipil LBH Makassar, *Wawancara*, Makassar, 10 Juli 2017.

¹³Suharno, Wakil Direktur Bidang Riset LBH Makassar, *Wawancara*, Makassar, 10 Juli 2017.

mahasiswa dan memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat untuk meningkatkan wawasannya terkait dengan hukum.¹⁴

Kendala yang dihadapi Lembaga Bantuan Hukum Makassar dalam menangani kasus pelanggaran HAM, menurut Suharno yaitu

Bahwa kendalanya ada pada aparat kepolisian yang sangat cenderung melindungi institusinya misalkan kasus represifitas aparat kepolisian, yang melakukan pelanggaran HAM dari aparat kepolisian dan kami mengadupun juga kepada pihak kepolisian. Kemudian yang menjadi kendala kami juga yaitu kurangnya atau terbatasnya kewenangan KomNas HAM dalam menangani kasus pelanggaran HAM.¹⁵

Kemudian ditambahkan oleh Abdul Azis Dumpa yaitu

Bahwa yang menjadi kendala dalam menangani kasus pelanggaran HAM adalah kita berhadapan langsung dengan aktornya yaitu negara misalnya ketika seseorang dituduh melakukan pencurian lalu mengalami penembakan dan penyiksaan tentunya kami melaporkannya juga kepada kepolisian padahal yang melakukan tindakan pelanggaran ini adalah pihak kepolisian dan cenderung saling melindungi. Dan kesadaran aparat akan pemenuhan pelanggaran HAM sangat rendah sehingga kami kesulitan mengakses atau sulitnya kami dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM, jadi kesadaran aparat itu sangat kecil akan pemenuhan HAM yang masih sangat rendah dan ruang yang diberikan oleh aparat kepolisian untuk komplek juga sangat kecil. Dan yang terakhir yang menjadi kendala ialah masyarakat tidak paham tentang HAM misalnya ada isu tentang HAM, sedang masyarakat tidak memahami apa itu HAM.¹⁶

Upaya yang dilakukan oleh lembaga bantuan hukum makassar dalam menangani pelanggaran HAM menurut Suharno ialah

Dengan melakukan pelaporan kepada pihak kepolisian dan KomNas HAM serta melakukan semacam kampanye atas pelanggaran HAM yang terjadi. Serta Mendorong regulasi misalnya aturan-aturan dalam meminimalisir kasus pelanggaran HAM yang terjadi kemudian melakukan kampanye terkait pelanggaran HAM yang terjadi dan memberikan pendidikan hukum pada masyarakat untuk menambah wawasan mereka terkait dengan hukum.¹⁷

¹⁴Abdul Aziz Dumpa, Koordinator Hak Sipil LBH Makassar, *Wawancara*, Makassar, 10 Juli 2017.

¹⁵Suharno, Wakil Direktur Bidang Riset LBH Makassar, *Wawancara*, Makassar, 10 Juli 2017.

¹⁶Abdul Aziz Dumpa, Koordinator Hak Sipil LBH Makassar, *Wawancara*, Makassar, 10 Juli 2017.

¹⁷Suharno, Wakil Direktur Bidang Riset LBH Makassar, *Wawancara*, Makassar, 10 Juli 2017.

Abdul Azis Dumpa juga menambahkan dalam komentarnya bahwa yang menjadi upaya oleh lembaga bantuan hukum makassar dalam menangani pelanggaran HAM, ialah

Dengan mengidentifikasi siapa, upaya dan lembaga apa saja yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM. Jadi kami melakukan semua upaya baik berupa litigasi maupun non litigasi dan semua lembaga kami gunakan misalnya orang dilanggar haknya sebagai korban ada upaya lain yaitu melapor kepada LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban), ketika dilanggar haknya oleh kepolisian maka kita laporkan ke lembaga kepolisian juga, ketika dilanggar haknya kita laporkan ke KomNas HAM kalau aktornya adalah polisi kita laporkan ke KomNas HAM juga, kalau korbannya adalah anak maka kita laporkan ke lembaga perlindungan anak jadi kami tidak menggunakan jalur hanya satu, tapi semua ruang kami gunakan, semua sumber daya itu kami gunakan.¹⁸

Menurut penulis terkait dengan hasil wawancara dari beberapa informan bahwa terjadinya kasus pelanggaran HAM itu tidak terlepas dari campur tangan negara, bahkan yang kerap kali melakukan suatu pelanggaran HAM itu dilakukan oleh aparat hukum itu sendiri misalkan dari institusi kepolisian, yang seringkali melakukan suatu tindakan represif terhadap warga yang belum tentu melakukan suatu kesalahan bahkan mendapatkan suatu penembakan hingga menyebabkan warga yang tertuduh tersebut terbunuh dan pihak kepolisian juga seringkali menangkap warga tanpa adanya surat perintah penahanan.

Kemudian menurut salah satu informan yaitu bapak Abd. Azis Dumpa bahwa pihak kepolisian cenderung melindungi institusi atau lembaganya yang membuat warga yang melaporkan suatu kasus pelanggaran HAM merasa tidak mendapatkan suatu keadilan seutuhnya dan kesadaran aparat akan pemenuhan pelanggaran HAM sangat rendah sehingga LBH Makassar kesulitan mengakses atau sulit dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM. Menurut komentar dari salah seorang informan bahwa ketika suatu kasus pelanggaran terjadi maka LBH Makassar akan menganalisis apakah itu termasuk pelanggaran HAM atau bukan.

¹⁸Abdul Aziz Dumpa, Koordinator Hak Sipil LBH Makassar, *Wawancara*, Makassar, 10 Juli 2017.

Dan yang menjadi upaya dari pihak Lembaga Bantuan Hukum dalam menangani kasus pelanggaran HAM diantaranya ketika mendapatkan suatu tindakan pelanggaran dari pihak kepolisian maka kasus tersebut dilaporkan di pihak kepolisian, ketika hak seseorang telah dilanggar maka kasus tersebut dilaporkan di KOMNAS HAM kalau aktornya dari pihak polisi maka dilaporkan di KOMNAS HAM juga, kalau korbannya adalah seorang anak maka kasus tersebut dilaporkan di Lembaga Perlindungan Anak.

Dari segi non-litigasi LBH Makassar juga melakukan suatu upaya penanganan pelanggaran HAM dengan membangun aliansi masyarakat yang melawan atau anti akan terjadinya suatu kasus pelanggaran HAM, melakukan suatu kampanye perlawanan terhadap pelanggaran HAM yang terjadi seperti menggunakan petisi-petisi yang mengandung perlawanan akan kasus pelanggaran HAM dan LBH Makassar juga melakukan suatu pendidikan hukum yang bertujuan untuk menambahkan wawasan masyarakat terkait dengan masalah hukum. Oleh karena itu, LBH Makassar tidak hanya melakukan dari satu lini tapi LBH Makassar melaluinya dengan menggunakan semua sumber daya.

C. Pandangan Hukum Islam dalam Upaya Penanganan oleh LBH Makassar Terhadap Pelanggaran HAM yang Terjadi di Kota Makassar

Berkaitan dengan pandangan hukum Islam dalam upaya penanganan oleh LBH Makassar terhadap pelanggaran HAM yang terjadi di kota Makassar, dalam hal ini Suharno, S.H mengatakan, yaitu

“Bahwa dalam kacamata Islam sama dengan HAM misalnya hak atas hidup, hak atas tidak dikenanya hukuman yang berlaku surut, hak berserikat, hak untuk bebas berkeyakinan, hak untuk diperbudak, hak atas pendidikan dan hak atas kesehatan dan lain-lain. Dalam hukum Islam juga dianjurkan untuk melakukan keadilan. Terkait dengan kebebasan beragama, hal ini sudah pernah terjadi di masa Rasulullah saw seperti yang tercantum dalam piagam Madinah kemudian di dalam Al-Qur'an juga ditegaskan terkait kebebasan

akan beragama dan berkeyakinan, Allah swt berfirman dalam Q.S Al-Kafirun/109: 6 yang berbunyi :¹⁹

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ﴿٦﴾

Terjemahnya :

“Bagimu agamamu dan bagiku agamaku”.²⁰

Kemudian ditambahkan lagi oleh Abdul Azis Dumpa, S.H, yaitu

“Bahwa tidak ada agama yang lepas dari penghargaan akan sesama manusia, Islam juga menjamin akan pemenuhan hak asasi manusia. Namun, yang menjadi masalah adalah penganutnya yang cenderung melanggar Hak Asasi Manusia itu sendiri”.²¹

Menurut penulis terkait dengan hasil wawancara dari beberapa informan menyangkut pandangan hukum islam dalam upaya penanganan oleh LBH Makassar terhadap pelanggaran HAM yang terjadi di Kota Makassar bahwa tidak ada agama yang membatasi hubungan antara sesama manusia dan tidak ada agama yang membolehkan adanya kekerasan antara sesama manusia. Menurut salah seorang informan Bapak Suharno, S.H bahwa salah satu contoh dari kebebasan berserikat dalam Islam, itu pernah dilakukan pada masa Rasulullah saw yang tercantum di Piagam Madinah dan juga tercantum dalam Al-Qur'an surah Al-Kafirun ayat 6 yang artinya “Untukmu agamamu, Untukku agamaku”.

Alasan untuk menerima perbedaan dan tidak memaksakan agama seseorang kepada yang lain sangat sederhana, bahwa keberadaan agama yang dianut itu sama halnya dengan orang lain yang sama-sama memiliki *truth claim* (klaim kebenaran). Yang paling esensial adalah bahwa keyakinan terhadap agama adalah bagian yang paling personal, individual, eksklusif, tersembunyi dari

¹⁹Suharno, Wakil Direktur Bidang Riset LBH Makassar, *Wawancara*, Makassar, 10 Juli 2017.

²⁰Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Sinergi Pustaka, 2012), h. 919.

²¹Abdul Aziz Dumpa, Koordinator Hak Sipil LBH Makassar, *Wawancara*, Makassar, 10 Juli 2017.

manusia, dan karena itu tidak ada kekuatan apapun selain kekuasaan Tuhan yang bisa memaksa suatu keyakinan. Nabi Muhammad saw sekalipun tidak bisa memaksa siapapun agar mengikuti ajarannya,²² sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S Al-Ghaysiah/88:22 yang berbunyi :

لَسْتُ عَلَيْهِمْ بِمُصِطِرٍ ﴿٢٢﴾

Terjemahannya:

Kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka.²³

Dan dalam Q.S Yunus/10:99 yang berbunyi:

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ
حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٩٩﴾

Terjemahannya:

Dan Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka Apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya ?²⁴

Sedangkan pada ayat lain, Allah swt melarang umat Islam mencaci maki sesembahan pemeluk agama lain, sebagaimana pada firman Allah swt dalam Q.S Al-An'am/6:108 yang berbunyi:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدَوًّا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۖ
كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ ﴿١٠٨﴾

²²Misrah, *Kebebasan Beragama dalam Perspektif Hadis*, Miqot, Vol. XXXIV No. 2 (Juli-Desember 2010), h. 176.

²³Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 592.

²⁴Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 220.

Terjemahan:

Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.²⁵

Paradigma Al-Qur'an tentang keyakinan dan kepemelukan agama yang bersifat personal-privat dan tidak dapat dipaksakan kepada siapapun seperti tersebut di atas, menjadi salah satu inti ajaran Islam yang luhur dalam membina hubungan harmonis dan rukun antar sesama manusia di atas bumi ini. Karenanya, dengan tegas Allah swt berfirman dalam Q.S Al-Baqarah/2: 256 yang berbunyi:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۚ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ
وَيُؤْمِرْ بِاللَّهِ فَقَدْ أَسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ
عَلِيمٌ

Terjemahan:

Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Dalil ini mengindikasikan bahwa tidak boleh ada paksaan bagi seseorang dalam memeluk suatu agama, termasuk untuk memeluk agama Islam. Adapun sebab-sebab turunnya ayat ini, dimana Ibnu Abbas r.a berkata: “Ada seorang sahabat Anshar yang berasal dari Bani Salim bin Auf yang bernama Hushain r.a, ia mengajak dua anaknya yang beragama Nashrani untuk masuk Islam. Namun mereka menolak, lalu Hushain r.a pun mengadukannya ke Rasulullah saw dan berkata “Apakah aku perlu memaksa kedua anakku untuk masuk Islam ?” dan atas

²⁵Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 141.

pertanyaan itu Allah swt menurunkan ayat ini. (HR. Ibnu Jarir. Lihat Ibnu Katsir: 1/418).²⁶



²⁶Ahmad Hatta, *Tafsir Qur'an Perkata Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Terjemah* (Jakarta: Maghfirah Pustaka), h. 42.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Upaya penanganan yang telah dilakukan LBH Makassar terhadap pelanggaran HAM yang terjadi di Kota Makassar dilihat dari dua jalur yaitu jalur litigasi dimana LBH Makassar melakukan pendampingan terhadap masyarakat yang mengalami kasus pelanggaran HAM di persidangan. Adapun jalur non litigasi dimana LBH Makassar membangun aliansi masyarakat dan mahasiswa dan melakukan kampanye anti pelanggaran HAM serta Memberikan pendidikan hukum terhadap masyarakat dan mendorong regulasi misalnya aturan-aturan dalam meminimalisir kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Kota Makassar.
2. Pandangan Hukum Islam terhadap penanganan pelanggaran HAM bahwa Islam dengan HAM masing-masing mengedepankan kepentingan umat manusia. Pada masa Rasulullah saw, kebebasan beragama telah diatur dalam piagam Madinah. Dan di dalam Al-Qur'an terkait kebebasan akan beragama, juga dipertegas dalam Q.S Al-Kafirun/109:6 yang artinya "Untukmu agamamu, dan untukku lah, agamaku".

B. Implikasi Penelitian

Adapun penulis melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Peranan Lembaga Bantuan Hukum dalam Penanganan Kasus Pelanggaran HAM Ditinjau dari Hukum Islam", yaitu:

1. Untuk memberikan pemahaman kepada pembaca bahwa ketika berurusan dengan hukum terutama pada kasus pelanggaran HAM maka seharusnya

memohon bantuan hukum kepada LBH demi mendapatkan suatu pendampingan hukum yang pada akhirnya mendapatkan suatu keadilan dan kasus yang menjeratnya juga dapat diselesaikan dengan baik.

2. Ketika masyarakat telah melakukan permohonan bantuan hukum di LBH terutama pada kasus pelanggaran HAM, maka pihak dari LBH akan berusaha untuk menyelesaikan kasus pelanggaran tersebut dengan baik, sehingga masyarakat yang melakukan permohonan bantuan hukum tersebut, disamping dapat mengetahui atau menambah wawasannya yang berkaitan dengan hukum, masyarakat juga dapat merasakan suatu keadilan hukum.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdun, Abdullah. *Islam dan Hak-hak Asasi Manusia*. Bandung: Alma'arif, 1980.
- Al-Faruq, Asadullah. *Hukum Acara Peradilan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Yudistia, 2009.
- Antonio, Cassesse. *Hak Asasi Manusia di Dunia yang Berubah*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1994.
- Cholid Norbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Cet. 12; Jakarta: Bumi Aksara, 2012.
- Chrisbiantoro dan M Nur Sholikin Satrio Wirataru. *Bantuan Hukum Masih Sulit Diakses: Hasil Pemantauan di Lima Provinsi Terkait Pelaksanaan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum*. Jakarta: Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS]. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia [PSHK]. dan Australia Indonesia Partnership for Justice [AIPJ], 2014.
- Djunaedi, Karnasudirdja Eddy. *Dari Pengadilan Militer Internasional Nuremberg ke Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia*. PT. Tatanusa, Jakarta, 2003.
- Eko Riyadi dan Supriyanto Abdi. *Mengurai Kompleksitas Hak Asasi Manusia (Kajian Multi Perspektif)*. Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia (PUSHAM) Universitas Islam Indonesia, 2007.
- Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Cet. 3; Jakarta: Salemba Humanika, 2012.
- Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*. Ed. 1, Cet. 4; Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Ilyas, Amir. *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta dan PuKAP-Indonesia, 2012.
- Kementerian Agama Republik Islam. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Sinergi Pustaka, 2012.
- K. M. Smith, Dkk, Rhona. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia (PUSHAM) Universitas Islam Indonesia, 2008.
- Kuffal. *Penerapan KUHAP dalam Praktek Hukum*. Malang: UMM Press, 2004.
- Muladi. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: The Habibie Center, 2002.
- Prinst, Darwan. *Sosialisasi dan Diseminasi Penegakan Hak asasi manusia*. Bandung: Ctira Aditya Bakti, 2001.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Ed. 3; Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

- Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini. *Advokat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Rizki, Rudi M. *Catatan mengenai Tanggung-jawab Negara atas Pelanggaran Berat HAM, dalam Mieke Komar Kantaatmadja dan Etty R. Agoes (edit.), Mochtar Kusumaatmadja: Pendidik dan Negarawan*, Bandung: Alumni, 1999.
- Ruslan, Rosady. *Metode Penelitian: Public Relations & Komunikasi*. Edi. 1, Cet. 5; Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Simon, Pattiradjawane. *Mengenal Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi dan Undang-Undang*. Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 2014.
- Soekanto, Soejono. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: UII Pres, 1984.
- . *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. 3; Jakarta: Universitas Indonesia (UII) Press, 1986.
- Tim KontraS. *Panduan untuk Pekerja HAM: Pemantauan dan Investigasi Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan Indonesia Australia Legal Development Facility (IALDF, 2009.
- Widodo, Dkk. *Kamus Ilmiah Polpuler: Dilengkapi Ejaan yang Disempurnakan dan Pembentukan Istilah*. Cet. 2; Yogyakarta: Absolut, 2002.
- Widyadharma, Ridwan. *Profesional Hukum dalam Pemberian Bantuan Hukum*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010.
- Yasid, Abu. *Aspek-Aspek Penelitian Hukum Hukum Islam - Hukum Barat*. Cet. I ; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- YLBHI. *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*. Cet. I ; Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009.

ALA UDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Sulfi Alis, lahir di Desa Batetangnga, Kab. Polewali Mandar pada tanggal 25 Mei 1995 merupakan anak sulung dari lima bersaudara, hasil dari buah cinta pasangan bapak M. Alis M, dengan Ibu Nasrah. Jenjang pendidikannya ditempuh mulai dari SDN 012 Kanang, Desa Batetangnga, Kec. Binuang pada Tahun 2002 hingga 2007 Kemudian melanjutkan sekolah tingkat pendidikan di Madrasah Tsanawiah Pondok Pesantren Al-Ihsan DDI Kanang di Desa Batetangnga kec. Binuang Kab. Polewali Mandar pada Tahun 2007 hingga tahun 2009, lalu kemudian

melanjutkan pendidikan pada Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Al-Ihsan DDI Kanang Desa Batetangnga Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar pada tahun 2010 hingga 2013. Pada jenjang inilah penulis banyak aktif di Organisasi baik intra maupun ekstra yakni pada organisasi intra penulis terpilih sebagai ketua pada Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) Periode 2012-2013 dan di organisasi ekstra penulis aktif sebagai pengurus Remaja Masjid seperti Ikatan Remaja Masjid Dusun Biru (IRDUB) dan organisasi kepemudaan seperti halnya Karang Taruna.

Pada tahun 2013 penulis melanjutkan pendidikan pada jenjang Strata satu (S1) pada Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar di Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan (HPK). Pada jenjang tersebut disamping aktivitas kuliah, penulis juga aktif organisasi, dimana penulis sempat menjabat sebagai kordinator bidang keagamaan Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Hukum Pidana dan Ketatanegaraan periode 2014-2015, Anggota di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Syari'ah dan Hukum, Kom. UIN Alauddin Makassar, Cab. Gowa. Penulis juga aktif organisasi yang bergerak di bidang sosial seperti halnya Front Mahasiswa Demokrasi-Sentra Gerakan Muda Kerakyatan (FMD-SGMK) Makassar. Dan juga aktif di organisasi yang berbasis paguyuban (Organda) yaitu Kerukunan Keluarga Pelajar Mahasiswa Batetangnga (KKPMB), Polewali Mandar.